



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT KERJA KOMISI VI DPR RI
DENGAN MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL RI
DAN MENTERI KOPERASI DAN UKM RI**

- Tahun Sidang : 2023-2024
Masa Persidangan : I
Rapat Ke- : 5 (lima)
Jenis Rapat : Rapat Kerja
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Senin, 4 September 2023
Waktu : Pukul 14.42 s.d 17.39 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I Lt.1, Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270
Ketua Rapat : Martin Manurung, S.E., M.A (Wakil Ketua Komisi VI DPR RI/F-P. Nasdem)
Acara : 1. RKA KL Tahun Anggaran 2024 (Pagu Anggaran); dan
2. Pelaksanaan anggaran s.d. triwulan II TA 2023.
Sekretaris Rapat : Dewi Resmini, S.E., M.Si.
(Kabag Sekretariat Komisi VI DPR RI)
Hadir : **A. ANGGOTA DPR RI:**
38 dari 54 orang Anggota dengan rincian:

**1. FRAKSI PARTAI DEMOKRAS INDONESIA
PERJUANGAN (F- PDIP)**

10 dari 12 orang Anggota

1. Adisatrya Suryo Sulisto
2. Prof. Assc. Dr. Darmadi Durianto, S.E., M.B.A.
3. Rieke Diah Pitaloka
4. ST. Ananta Wahana, S.H., M.H.
5. Sonny T. Danapramita
6. Ir. Deddy Yevri Hanteru Sitorus, M.A.
7. Dr. Evita Nursanty, M.Sc.
8. Sondang Tiar Debora Tampubolon
9. dr. H. Mufti A. N. Anam
10. Dr. Ir. Harris Turino, M.Si., M.M.

**2. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
(F- PG)**

6 dari 7 orang Anggota

1. M. Sarmuji, S.E., M.Si.
2. Gde Sumarjaya Linggih, S.E., M.A.P.
3. Ir. H. Mohamad Idris Laena

4. H. Singgih Januratmoko, S.K.H., M.M.
5. Doni Akbar, S.E., M.M.
6. Nusron Wahid

3. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (F- P. GERINDRA)

5 dari 7 orang Anggota

1. Khilmi
2. Ir. H. La Tinro La Tunrung
3. H. Husein Fadlulloh, B.Bus., M.M., MBA.
4. Hendrik Lewerissa, S.H., LL.M.
5. Mulan Jameela

4. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (F- P. NASDEM)

5 dari 6 orang Anggota

1. Martin Manurung, S.E., M.A
2. Zuristyo Firmadata, S.E., M.M.
3. M. Syamsul Luthfi, S.E.
4. H. Rudi Hartono Bangun, S.E., M.A.P.
5. H. Subardi., S.H., M.H.

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F- PKB)

4 dari 6 orang Anggota

1. Ir. H. M. Nasim Khan
2. Siti Mukaromah, S.Ag., M.A.P.
3. H. Ali Ahmad
4. Luluk Nurhamidah, M.Si., M.P.A>

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F- PD)

3 dari 5 orang Anggota

1. Dr. Ir. E. Herman Khaeron, M.Si.
2. Muslim, SHI., M.M.
3. Hj. Melani Leimena Suharli

7. FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera (F- PKS)

2 dari 4 orang Anggota

1. Rafly
2. Mahfudz Abdurrahman, S.Sos.

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F- PAN)

3 dari 4 orang Anggota

1. Abdul Hakim Bafagih
2. Eko Hendro Purnomo, S.Sos.
3. Hj. Intan Fauzi, S.H., LL.M.

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (F-PPP)

0 dari 2 orang Anggota

-

B. UNDANGAN/PEMERINTAH:

1. Menteri Investasi/Kepala BPKM RI (Bahliil Lahadalia, S.E.) beserta jajaran
2. Menteri Koperasi dan UKM RI (Drs. Teten Masduki) beserta jajaran

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera buat kita semua,

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPR RI,
Selamat datang kami ucapkan kepada Saudara Menteri Investasi/Kepala BPKM RI, Bapak Bahliil Lahadalia,
Saudara Menteri Koperasi dan UKM RI, Bapak Teten Masduki, tentu beserta jajaran,

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan rapat kerja dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM Republik Indonesia dan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia pada hari ini dalam keadaan sehat *wal afiat*.

Sesuai dengan hasil keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tanggal 18 Januari 2023 tentang Tata cara Pelaksanaan Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan Pasca Pencabutan Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 30 Desember 2022, maka rapat-rapat yang dilakukan oleh Alat Kelengkapan Dewan dan mitra kerja dilakukan seperti biasa, normal.

Bapak-Ibu hadirin yang kami muliakan,

Menurut laporan dari Sekretariat Komisi VI DPR RI, rapat kerja hari ini telah dihadiri dan ditandatangani oleh 24 orang dari 54 Anggota Komisi VI DPR RI yang terdiri atas 8 fraksi. Dengan demikian, kuorum telah terpenuhi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 281 ayat (1) Peraturan DPR tahun 2020 tentang Tata Tertib dan Pasal 276 ayat (1), maka perkenankan kami membuka rapat kerja pada hari ini dan rapat saya nyatakan terbuka untuk umum.

Setuju?

(KETUK PALU 1 KALI)
(RAPAT DINYATAKAN TERBUKA UNTUK UMUM)
(RAPAT DIBUKA PUKUL 14.42 WIB)

Kami juga ingin mendapatkan persetujuan, apakah rapat kita pada hari ini bisa kita akhiri pada pukul 4? Pukul 16 sore ya?

Setuju?

(KETUK PALU 1 KALI)

Terima kasih kami ucapkan kepada Menteri Investasi/Kepala BKPM RI dan Menteri Koperasi dan UKM RI, atas kesediaan waktunya menghadiri rapat kerja pada hari ini. Sesuai undangan yang telah kami sampaikan, agenda rapat pada hari ini untuk membahas mengenai;

- yang pertama, RKA K/L tahun anggaran 2024, pagu anggaran, dan
- yang kedua, pelaksanaan anggaran sampai dengan triwulan II tahun anggaran 2023.

Dapat kami sampaikan bahwa Komisi VI DPR RI dalam rapat kerja tanggal 9 Juni 2023 telah menyetujui pagu indikatif Kementerian Investasi/BKPM RI sebesar Rp1.226.376.670.000,00 dan usulan tambahan anggaran Kementerian Investasi/Kepala BKPM RI tahun 2024 sebesar Rp875 miliar, guna memenuhi kebutuhan prioritas yang belum terakomodir.

Kemudian dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Kementerian Koperasi dan UKM RI pada tanggal 8 Juni 2023 telah menyetujui pagu indikatif sebesar Rp1.497.938.999.000,00 dan usulan tambahan anggaran tahun 2024 sebesar Rp1.511.075.512.000,00.

Berdasarkan nota keuangan beserta RAPBN tahun anggaran 2024 yang disampaikan oleh Pemerintah kepada DPR RI, anggaran Kementerian Investasi/Kepala BKPM RI dalam RAPBN tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar 1.226,4 miliar, yang terdiri atas program dukungan manajemen sebesar Rp416,1 miliar, program penanaman modal sebesar 810,2 miliar.

Demikian juga pada anggaran Kementerian Koperasi dan UKM RI dalam RAPBN tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar 1.497,9 miliar, yang diarahkan pada penyelesaian target prioritas RPJMN dan Renstra yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan, serta revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.

Untuk itu dalam rapat kerja hari ini, diharapkan terdapat gambaran terkait rencana kerja anggaran dan prioritas program Kementerian Investasi/Kepala BKPM RI dan Kementerian Koperasi dan UKM RI tahun anggaran 2024, serta progres penyerapan anggaran dan kinerja kementerian sampai dengan triwulan II tahun 2023. Untuk itu, maka sekarang kami persilakan, mungkin pertama kepada Menteri Investasi/Kepala BKPM Republik Indonesia untuk menyampaikan pemaparannya, kami persilakan.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM RI (BAHLIL LAHADALIA, S.E.):

Pimpinan yang kami hormati,

Boleh kami usul, kebetulan kue saya belum habis dan Pak Teten adalah senior, kalau bisa Pak Teten dulu, Pimpinan, mohon maaf.

KETUA RAPAT (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Gimana, Bapak Menkop? Baik, kami persilakan pada Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia.

MENTERI KOPERASI DAN UKM RI (Drs. TETEN MASDUKI):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua,
Om swastiastu,
Nammo buddhaya,
Salam kebajikan,

Yang saya hormati Pak Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan BKPM,
Pimpinan Komisi VI dan para Anggota,

Hari ini sesuai dengan agenda pembahasan ada dua, yaitu yang pertama RKP dan RKA Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2024 dan kedua, pelaksanaan anggaran sampai dengan triwulan II tahun 2023. Sebagaimana diketahui, pagu anggaran Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2024 sebesar 1,4 triliun lebih, dengan rincian sebagai berikut, program dukungan manajemen sebesar 400 miliar lebih, lalu program kewirausahaan 1 triliun lebih, dengan peruntukan antara lain untuk anggaran fungsi pendidikan, belanja operasional pegawai, belanja operasional barang, dan juga pembiayaan kegiatan prioritas nasional seperti pendataan lengkap, rumah produksi bersama, yang hari ini sesuai arahan presiden, diproyeksikan untuk program hilirisasi sumber daya alam hasil perkebunan, sektor kelautan, dan juga prioritas nasional lainnya.

Sandingan anggaran Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2023-2024, pagu anggaran sebesar 98 miliar lebih atau 7,03% dari pagu anggaran tahun 2023. Dari total anggaran itu dialokasikan kepada masing-masing unit kedeputian Sekretariat Kementerian, LPDB, LLP, dan Dekosentrasi dan Dekopin untuk pelaksanaan program prioritas dan program atau kegiatan strategis Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2024.

Berikutnya, program prioritas Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2024. Pada tahun 2024, terdapat ada 8 fokus program prioritas, antara lain pendataan lengkap koperasi dan UKM, dua, pengembangan rumah produksi bersama atau *factory sharing*, lalu ketiga, pengembangan layanan rumah kemasan, *redesign plus* KUMKM, kelima, revitalisasi pasar rakyat, keenam, pengembangan koperasi modern, ketujuh, pengentasan kemiskinan ekstrem, dan kedelapan, pengembangan kewirausahaan nasional.

Nah, secara khusus hilirisasi sumber daya alam berbasis UMKM, ini yang sebagaimana tadi saya arahan dari Bapak Presiden yang juga disampaikan pada pidato kenegaraan pada tanggal 16 Agustus 2023, bahwa hilirisasi atau industrialisasi menjadi salah satu langkah penting bagi Indonesia untuk menjadi negara maju di tahun 2045. Dan hilirisasi yang dilakukan, tidak hanya pada komoditas mineral atau tambang tapi juga nonmineral, seperti sawit, rumput laut, kelapa, dan komoditas-komoditas potensial lainnya yang mengoptimalkan kandungan lokal, yang bermitra dengan para petani dan nelayan, ya, sehingga manfaatnya terasa langsung bagi rakyat kecil. *Nah*, ini, Pak Ketua, nanti mohon dukungan, karena Pak Presiden minta program hilirisasi yang dalam rumah produksi bersama itu minta diperbanyak, ya, supaya betul-betul ini nanti skalanya cukup besar.

Untuk mendukung itu, sebagai tahap awal, Kementerian Koperasi telah melakukan pemetaan melalui sembilan komoditas unggulan, di antaranya komoditas pangan dan nonpangan. Yang selanjutnya, akan dirancang desain pengembangan industri yang memanfaatkan keunggulan sumber daya tersebut melalui hilirisasi komoditas unggulan. Harapannya, hilirisasi komoditas unggulan berbasis UMKM dan koperasi ini akan menciptakan pertumbuhan ekonomi sekaligus mengatasi *in equality* serta memperkuat struktur industri nasional. Jadi untuk menjadi negara maju, kita *kan* perlu menaikkan pendapatan per kapita, hari ini 4.500 dolar per kapita menjadi minimum kira-kira 13 ribuan lebihlah, dolar. *Nah*, hari ini 97% lapangan kerja itu di sektor mikro, di sektor informal. Jadi tugas besar kita ya bagaimana melahir, menghadirkan lapangan kerja yang lebih berkualitas. *Nah*, karena itu program hilirisasi yang melibatkan UMKM, melibatkan koperasi, harus dikaitkan dalam konteks ini.

Berikutnya, capaian program Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2023. Kementerian Koperasi dan UKM terus memastikan beragam kebijakan strategis yang telah disiapkan, dapat diturunkan ke dalam inisiatif konkret untuk membangun ekosistem yang dibutuhkan oleh para pelaku usaha dari hulu ke hilir. Dari mulai model bisnis kelembagaan yang relevan dengan perkembangan zaman, pembiayaan yang efektif dan mudah diakses, transformasi teknologi, sampai dengan pendampingan usaha yang terhubung dengan pasar, bagi koperasi dan UMKM di tanah air. *Nah*, beberapa program tersebut di antaranya, perluasan akses pembiayaan melalui KUR, ya. *Nah*, ini sebagaimana diketahui, memang ada pelambatan, penyaluran kredit bukan hanya untuk UMKM tapi keseluruhan. Jadi realisasi KUR per 30 Agustus 2023 adalah sebesar 149,9 triliun dari target kita 460 triliun.

Lalu yang, *nah*, dalam hal ini kami terus, Pak Ketua, kami memahami penyaluran KUR itu meskipun sudah ada regulasi tanpa agunan sampai 100 juta, realisasinya memang sulit, bukan. Dan memang kami sudah lakukan kajian, ada, di 145 negara sudah menerapkan *credit scoring*, jadi tidak lagi menggunakan, apa, kolateral. Ya UMKM rata-rata *enggak* punya aset, jadi kalau dimintakan aset sebagai kolateral, pasti memang *enggak* bisa. *Nah*, kemarin ini juga disampaikan arahan presiden di rapat HIPMI bahwa harus terus diupayakan bagaimana penerapan KUR tidak lagi pakai kolateral berupa aset tapi berupa *credit scoring*. Dan menurut saya ini juga jauh lebih aman bagi bank, karena kalau nilai aset itu gampang dimanipulasi, tapi kalau *credit scoring*, itu hampir sulit, karena ini kan berupa data transaksi kepada *buyer*, kepada *supplier*, kepada pihak pajak, dan lain sebagainya. *Nah*, ini yang saya kira perlu dukungan kita semua, karena UMKM masalah utamanya adalah akses pembiayaan. Sementara kita tadi ditantang bagaimana melahirkan lapangan kerja yang berkualitas. Bagaimana mereka bisa naik kelas, kalau mereka *enggak* bisa mengambil pembiayaan terutama untuk modal investasi.

Yang kedua, transformasi digital. Saya kira sering ini kita *udah* sampaikan, ini 30 juta target kita, hari ini 22,81 juta UMKM telah *on boarding*. *Nah*, melalui gerakan "Berubah Digital", kementerian, ya terus kita dorong *on boarding* digital. Kita juga terus selain mendorong UMKM-nya terhubung ke platform digital, kita juga terus mengambil prakarsa-prakarsa untuk munculnya banyak aplikasi digital yang lebih relevan untuk UMKM, terutama yang mikro. Karena yang mikro ini kalau disuruh *on boarding* di platform digital skala nasional, itu *enggak* bisa bertahan lama, karena mereka produksinya sedikit, produksinya kecil, sehingga mereka kita ingin dorong ada platform-platform lokal, ya dalam skala lokal.

Lalu yang ketiga, pendataan, *nah*, ini sangat penting sekali untuk ke depan, dalam perencanaan program yang akan lebih presisi, karena nanti pendataan ini *by name by address* di 240 kabupaten, di 34 provinsi, dengan total data sekitar 9 juta UMKM. Adapun tahun 2023,

Kementerian Koperasi dan UKM melakukan kerja sama dengan BPS di 2015 kabupaten/kota di 32 provinsi.

Nah, yang keempat, pembangunan pabrik minyak makan merah untuk koperasi petani sawit, saat ini baru terbangun satu minyak makan merah karena ada terkendala soal pembiayaan dari tiga *piloting*. Tapi hari ini kita sedang menyiapkan satu perpres ya yang memungkinkan seluruh koperasi petani sawit bisa membangun pabrik CPO dan juga minyak makan merahnya. *Nah*, ini bagian juga yang disebut oleh Pak Presiden sebagai bagian dari hilirisasi yang melibatkan para koperasi petani. Lalu yang kedua, penyaluran dana bergulir, *nah*, total penyaluran dana bergulir sampai dengan 30 Agustus 2023 1,03 triliun atau lebih dari 57,4% dan semua untuk koperasi. Dengan target penyaluran kepada koperasi sektor riil sebesar 30,5%.

Keenam, perluasan kemitraan UMKM dengan usaha besar atau BUMN, agar bisa menjadi penggerak ekonomi dalam rantai nilai global atau *global value chain*. *Nah*, pemerintah akan terus melakukan fasilitasi, pendampingan dan *business matching* untuk mendorong perluasan kemitraan dengan usaha besar, baik BUMN maupun swasta. Sampai dengan Agustus 2023, UMKM yang telah berhasil melakukan kemitraan adalah sebanyak 242 koma, eh 242.000,814 UMKM dengan 23 BUMN dan 7 usaha besar. *Nah*, ini kita masih kecil sekali ya, baru sekitar 7 persenanlah UMKM kita yang sudah terhubung ke rantai pasok usaha besar.

Nah, ketujuh, kita juga apa menggerakkan Program Solusi Nelayan, solar subsidi untuk nelayan. Ada lima *pilot project* telah beroperasi, melalui skema B2B, pembiayaan perbankan LPDB dan pembiayaan mandiri oleh koperasi, di antaranya di Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Lombok, Lombok Timur, Kabupaten Aceh Besar, Indramayu, Kabupaten Deliserdang, sementara dua *piloting* beroperasi bulan Oktober yaitu Kota Surabaya dan Kota Semarang. *Nah*, Solusi untuk nelayan ini, solar subsidi nelayan ini sangat penting, karena 60% biaya produksi nelayan itu untuk beli bahan bakar dan saat ini mereka hanya beli dari pengecer, rata-rata antara, sampai, bahkan ada yang sampai 12 ribu per liter. *Nah*, dengan SPBU mini ini, mereka bisa beli seharga SPBU, 6.800. *Nah*, ini yang kita akan *boost* terus, mohon dorongannya juga untuk BRI dan Pertamina, ya karena ini kita bekerja sama dengan Kementerian BUMN dan juga Pertamina.

Kita juga terus mengefektifkan 40% belanja pengadaan barang dan jasa pemerintah, ya, dan ini saya kira kebijakan substitusi impor ini ada kaitan, saya kira nanti juga dengan kebijakan investasi, karena pemerintah akan mendorong para importir untuk memproduksi di dalam negeri, ya, ini juga akan menghidupkan, saya kira, industri di dalam negeri.

Lalu progres realisasi anggaran kementerian, *nah*, tahun 2023 pagu Kementerian Koperasi dan UKM setelah dikurangi *automatic adjustment* sebesar 1,3 triliun, hingga saat ini sudah terealisasi sebesar 50,76%. Lalu upaya percepatan serapan anggaran tahun 2023 antara lain, ya kami akan mengawal program atau kegiatan prioritas dan terutama memiliki alokasi yang cukup besar seperti pendataan, rumah produksi bersama, rumah kemasan, dan lain sebagainya, agar dapat berjalan sesuai dengan rencana, karena secara garis besar berpengaruh terhadap serapan anggaran tingkat kementerian. Dan ini memang realisasinya banyak di akhir tahun.

Lalu yang kedua, menginventarisasi kembali kegiatan-kegiatan yang ada, khususnya kegiatan yang berdampak terutama kebijakan kementerian yang bernilai besar dan memerlukan waktu yang cukup lama dalam pelaksanaannya, serta mempercepat proses pengadaan barang dan jasa dengan tetap mempertimbangkan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Ketiga, melakukan *monitoring* dan evaluasi secara berkala, ya.

Demikian penyampaian terkait hal-hal yang akan kami lakukan di tahun 2024, serta capaian di tahun 2023. Mohon dukungan dari Pimpinan dan Bapak-Ibu Anggota Komisi VI DPR RI, agar semua program kegiatan prioritas tahun 2023 dapat terselenggara dengan optimal dan juga program kegiatan prioritas tahun anggaran 2024 ke depan.

Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Om shanti, shanti, shanti om,*

KETUA RAPAT (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Terima kasih, Pak Menteri Koperasi.

Sekarang kami persilakan Pak Menteri Investasi untuk menyampaikan paparan, *udah* selesai makan kue?

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM RI (BAHLIL LAHADALIA, S.E.):

Terima kasih, Pimpinan.

Yang kami hormati Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi VI,

Yang hari ini, saya melihat, sejak saya masuk rapat sejak menjadi anggota kabinet, ruangan ini berbeda dengan sebelum-sebelumnya, karena saya lihat ada secercah harapan di ruangan ini karena baru semua, karpetnya juga bagus dan Pimpinannya juga hari ini wajahnya, dua-duanya, senyum sekali. Semoga senyum dari Bapak-bapak, Ibu semua ini membawa rahmat yang baik untuk kita semua.

KETUA RAPAT (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Ada perubahan lah, ada perubahan.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM RI (BAHLIL LAHADALIA, S.E.):

Ada perubahan, ada perubahan.

Termasuk, termasuk koalisi pun ada perubahan.

Yang kami hormati Pak Teten Menteri Koperasi dan UMKM, dan seluruh pejabat Eselon I, dan rombongan termasuk Kementerian Investasi, Bapak-Ibu semua,

Atas perintah Pimpinan lewat surat undangan, hanya ada dua bagian saya memaparkan cepat-cepat saja, karena mengingat waktu yang ditetapkan oleh Pimpinan tadi hanya sampai dengan jam 4. Saya tidak ingin melanggar kesepakatan itu. Saya sangat tertib, Pimpinan, jadi izinkan, ini apalagi rapat ini, Pimpinan, tidak lagi membahas hal-hal yang berdampak pada suasana kebatinan tapi ini dalam rangka percepatan proses kerja-kerja kita dalam membangun bangsa dan negara.

Pimpinan, Pimpinan,

Saya memberikan sedikit *highlight* karena hari ini adalah rapat kerja kita, mungkin yang terakhir terkait dengan anggaran untuk periode kabinet sekarang, karena ini 2024. Jadi kita sudah masuk pada, tidak terasa ternyata, Pimpinan, jadi menteri itu, belum selesai barang ini. Kelihatannya DPR, DPR juga semakin, semakin begitu juga kelihatannya ya.

Pimpinan,

Kalau kita meng-*highlight* RPJM dari 2020 sampai dengan 2024, di mana 2020 adalah sebesar 817 triliun tapi kita mampu merealisasikan sebesar 820-an lebih. Kemudian 2021, RPJM itu 858,5 triliun, tapi Bapak Presiden memerintahkan kita harus bisa mencapai 900 triliun dan *alhamdulillah* kita mampu merealisasikan sebesar 900 triliun. 2022 itu target dalam RPJM kita 968,4 triliun, tapi perintah Bapak Presiden harus 1.200 triliun, kita mampu menyelesaikan 1.207 triliun. 2023 dalam RPJM itu sebesar 1.099,8 triliun tapi kita dikasih target 1.400 triliun. Dan *InsyAllah*, semoga tidak ada aral melintang, target ini juga bisa tercapai. Dan di 2024 renstra RPJM kita adalah sebesar 1.239,3 triliun, dan dikasih target lagi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 5%, kita dikasih target 1.650 triliun. Kira-kira itu, Pimpinan, yang kami mau laporkan untuk meng-*highlight*.

Yang kedua, realisasi investasi kita sampai pada kuartal, eh pada semester I dari target 1.400 triliun sudah mencapai Rp678,7 triliun atau setara dengan 48,5%, di mana PMA-nya 53,5%, PMDN-nya 46,5%. Dan satu hal, Pimpinan, salah satu ciri daripada investasi berkualitas, Bapak Presiden waktu kami dilantik memerintahkan kepada kami untuk menciptakan investasi yang berkualitas. Salah satu cirinya adalah penyebaran antara PMA, PMDN, serta investasi Jawa dan Luar Jawa. Saya ingin menjelaskan kepada Pimpinan, bahwa sejak 2020 kuartal ketiga sampai dengan 2023 kuartal kedua, *alhamdulillah*, investasi di luar Pulau Jawa sudah lebih besar ketimbang di Jawa, sebagai bentuk daripada manifestasi membangun Indonesia bukan Jawasentris tapi Indonesiasentris. Karena Bapak-Ibu yang ada di parlemen ini juga mencerminkan dari perwakilan dari provinsi-provinsi tersebut.

Pimpinan, kami melaporkan singkat juga terkait dengan negara mana saja yang masuk ke Indonesia, masih tetap Singapura paling tinggi, Pimpinan dan Bapak-Ibu semua Anggota Komisi VI. Singapura masih tinggi, kemudian disusul dengan Tiongkok, Hongkong, Jepang, Amerika, Malaysia, Korea, Belanda, dan beberapa negara lain. Saya ingin menyampaikan bahwa masih seperti sama, betul itu Singapur lebih banyak, tapi sebagian uang orang Indonesia yang ada di Singapur, Pimpinan. Jadi tidak malu-malu saya katakan ini sekalipun orang protes saya, dan Malaysia ini juga dijadikan *hub* oleh beberapa negara lain, termasuk Korea, ini masuk di sini *dulu*. Makanya kita segera membuat *financial center* di IKN, supaya bisa kita, uangnya yang masuk itu tidak perlu pakai perantara-perantara dari negara-negara mana lagi dan PP-nya *udah* selesai. Jadi di IKN itu Pimpinan nanti kita akan membangun *financial center* di sana.

Pimpinan, kami juga melaporkan bahwa dalam rangka mendorong hilirisasi dan industrialisasi tren berdasarkan sektor investasi, untuk barang logam dasar, industri logam dasar dan bukan mesin pada peralatannya, di 2019 kalau kita melihat grafiknya, Pimpinan, itu nomor empat. Ini sebenarnya untuk industri, Pimpinan, untuk membangun *smelter* industri-industri. *Nah*, kemudian kita dorong, supaya tidak terjadi deindustrialisasi yang terlalu dalam, maka kemudian kita lihat sampai dengan 2022, dari 2021 di nomor satu, 2022 dan sekarang semester ke II pun, dia menjadi nomor satu. Bahkan di 2022, itu mencapai target Rp171,2 triliun.

Pimpinan yang kami hormati,

Kami juga melaporkan bahwa realisasi anggaran kami dari anggaran total, anggaran kami di 2022, itu sebesar Rp1.131.982.046.000,00 dan sudah realisasi sebesar 70,9%. Jadi *udah* hampir habis uangnya dan programnya juga *udah alhamdulillah*, sisanya tinggal 29,1%.

Bapak-Ibu semua Pimpinan yang kami hormati,

Kami juga melaporkan, ini Pak Sesmen, jangan panjang-panjang, ini sudah mau habis. Kami juga melaporkan bahwa pagu kami, anggaran di 2024 sebesar Rp1.226.376.670.000,00, di mana program dukungan manajemen sebesar Rp416.144.568.000,00, sementara program penanaman modal Rp810.232.102.000,00. Memang nasib saya sama Pak Teten ini beda-beda tipis, Pak, jadi Pak Teten 1,4 triliun, saya 1,2 triliun, ada ekor-ekornya. Tapi di saat bersamaan, setiap kampanye, baik pileg maupun pilpres, selalu berbicara tentang UMKM. UMKM selalu *dibicarain* tentang, "Ini dalam rangka penciptaan lapangan pekerjaan tapi kenapa uangnya Pak Teten cuma 1,4 triliun?" Di satu sisi, tiap hari kita bicara tentang hilirisasi, investasi, pelayanan, uangnya cuma dikasih 1-2 triliun. Jadi, Pimpinan, ini kita sekolah bareng ulang, karena beban dikasih tinggi, *political*, eh politik keuangannya tidak berbanding lurus dengan beban. Saya tidak tahu ada apa, ya, saya *pingin* juga belajar sebenarnya sistem keuangan yang dibangun ini, mungkin ada teori baru. Mungkin karena saya dengan Pak Teten ini sudah lama tidak ikuti teori itu. Jadi, Pimpinan, kalau seperti ini, dalam pandangan saya, ini semua akan menjadi tema-tema kata-kata indah aja. Jadi *enggak* bisa kita mewujudkan ini dengan baik. Pak Teten *enggak* mau ngomong itu, karena saya junior, jadi saya mewakili Pak Teten. Deputinya senang, benar, Pak Deputi? Oh iya.

Saya pikir itu, Pimpinan, jadi dalam rangka itu kemarin kami ajukan anggaran tambahan 800 miliar, di mana itu adalah untuk membangun OSS. Dan karena tidak adanya anggaran tambahan, maka OSS tidak akan bisa kita sempurnakan seperti apa yang diinginkan Bapak-Ibu, yang mulia, untuk mau pakai seperti mobil Mercy. Jadi OSS sekarang itu hanya bayangannya seperti mobil Avanza. Kalau mobil Avanza, jangan disuruh untuk lari 160 km per jam, nanti terbalik di jalan tol, atau jangan disuruh untuk memuat orang hidup nyaman di dalam mobil Avanza. *Nah*, kalau kita mau pakai mobil bagus, Mercy, lari 160 pasti licin dan *stabilizer*-nya pasti jalannya bagus. Jadi ini penting, Pimpinan, jangan sampai *dikirain* Menteri Investasi *enggak* bisa memperjuangkan apa yang menjadi harapan rakyat lewat Bapak-Ibu Anggota Dewan yang terhormat. Tanyakan itu kepada Kementerian Keuangan, *kenapa* itu tidak terjadi.

Saya pikir, akhir kata, saya tidak ingin menjadi menteri yang cengeng hanya karena persoalan ini, tapi ini adalah persoalan tuntutan daripada rakyat. Sebagai bentuk pertanggungjawaban profesionalisme dalam bidang pemeriksaan keuangan, Pimpinan. Kita sudah WTP 13 kali, Pimpinan, BKPM berapa kali? Berapa? Oh 15 kali, saya dikoreksi sama Sesmen saya, bagus kau, berarti kau *enggak* bisa di *reshuffle*, bagus, 15 kali, Pimpinan, bagus-bagus. Jadi kita sudah WTP 15 kali, bukan karena kerjanya staf saya yang bagus, bukan, karena memang uangnya kecil. Demikian.

Terima kasih, Pimpinan, saya kembalikan pada Pimpinan.

KETUA RAPAT (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Iya baik, terima kasih kepada Menteri Koperasi dan Menteri Investasi.

Sekarang saatnya untuk Bapak-Ibu melakukan pendalaman, saya persilakan dari sebelah kiri dulu *deh*, Ibu Evita Nursanty.

F- PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.):

Terima kasih, Bapak Pimpinan.

Bapak Menteri Investasi dan BKPM,
Pak Menteri Koperasi dan UMKM, serta jajaran yang saya hormati,

Terima kasih atas paparan yang diberikan. Yang pertama, saya itu ingin sebenarnya, Pak, mengklarifikasi di anggaran ini mengenai yang Bapak sebut tadi, OSS. Bapak kan menganggarkan 800, di UMKM juga menganggarkan untuk data UMKM ini berapa, Pak? Cukup besar juga, 400. *Nah*, ini bagaimana sinergisitas, ini bukan Bapak sama Bapak saja, ada lagi kementerian yang lain juga, Perdagangan, menganggarkan juga untuk data, data, data, semuanya membuat anggaran untuk data. Jadi saya bertanya, *kenapa* data ini tidak jadi satu, *gitu*, Pak? *Kenapa* yang ini punya data, yang ini punya data, dan anggarannya sebenarnya tidak kecil, *gitu*, Pak. *Kenapa* tidak disinergikan antara satu kementerian dengan kementerian yang lain, Perdagangan juga ada, Pak.

Nah, terus mengenai Bapak katakan tadi bahwa anggaran kecil, Pak Teten, ya memang mungkin anggaran di sini kecil ya, Pak Teten ya, tapi kita jangan lupa, hampir semua BUMN, hampir semua departemen, itu memiliki anggaran untuk UMKM sendiri. Jadi anggaran itu tidak hanya di Kementerian Koperasi saja, tetapi anggaran itu ada di mana-mana, sampai di perusahaan-perusahaan BUMN. *Nah*, yang kita belum bisa melihat sekarang ini, bagaimana perjalanan daripada anggaran yang ada terpecah ini menjadi terpadu, Pak Bahlil, ini yang kita belum lihat, masing-masing masih dengan jalan sendiri-sendiri. Padahal kalau semuanya bisa disinergikan, semuanya bisa dipadukan, ini *output*-nya, saya rasa ini akan lebih baik lagi ke depan, sama dengan data tadi, Pak.

Kemudian saya mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Kementerian UMKM sekarang ini, Pak, Pak Teten, karena saya turun ke dapil ya, turun ke dapil dan kita melakukan sosialisasi-sosialisasi, banyaklah, positif yang kita terima. Hanya saja memang banyak pertanyaan-pertanyaan dari *floor* yang kita tidak bisa jawab, masalah KUR ya, Pak, ya, kemudian masalah permodalan, terutama ini, Pak Direktur Koperasi, mau bikin koperasi desa modalnya seperti apa? *Nah*, kita juga *enggak* bisa jawab hal-hal seperti itu, Pak Teten. Permodalan dari UMKM, saya katakan bisa dengan pinjaman ke BRI, dengan KUR murah, segala macam, *nah*, *cuman* kan pinjaman yang mereka minta ini kan tidak pinjaman besar sebenarnya, Pak. Makanya sebenarnya kita harus sarankan koperasi-koperasi desa itu harus ada, sehingga koperasi-koperasi desa inilah yang nantinya akan bersinergi dengan UMKM-UMKM yang ada di desa-desa. *Nah*, bagaimana ketika saya ditanya, permodalan koperasi ini, apakah nanti bisa dibantu? *Nah*, LPDB mungkin ada di sini, juga bisa apakah ini LPDB-nya ini hanya untuk koperasi yang besar saja, apakah koperasi yang baru dibangun di desa-desa atau pun di kabupaten ini juga bisa diberi bantuan? Saya juga perlu jawaban, sehingga ketika nanti ada pertanyaan-pertanyaan di *floor*, kita bisa jawab.

Nah, sekarang kita punya PR, saya rasa perdagangan mengemukakan hal yang sama, mengenai *cross border* Pak Bahlil, dari Investasi, dari Perdagangan, dari UMKM, *nah*, ini adalah isu bersama sebenarnya, mengenai *cross border* ini, yang apalagi apa namanya, kita tahu *cross border* ini kan dengan *mandatory pricing*, kan begitu ya Pak, ya. *Nah*, sekarang ini, apa *nih* yang

akan dilakukan Bapak-bapak? Bapak *sih* di media, saya sudah baca sebenarnya tidak setuju dengan apa namanya, rencana daripada *project* S-nya Tiktok. Saya sepakat dengan itu Pak, bahwa tidak seharusnya *social commerce* ini itu *enggak* ada yang bisa mengelola, menjual dan menginikan produk-produk mereka sendiri, sehingga itu jadi monopoli nantinya, Pak. *Nah*, bagaimana dengan UMKM kita, ketika ke depannya itu tidak bisa apa namanya, bersaing.

Namun sebelum keputusan, karena perdagangan akan merevisi peraturan mereka ya, Pak, ya, yang Undang-undang nomor berapa, kalau *enggak* salah 50 ya, Pak, ya? Yang akan kepmennya akan dirubah. *Nah*, ini lebih baik duduk bersama, didengar juga apa, masukan, karena kita tahu penolakan terhadap rencana pemerintah ini juga cukup besar, ya kan, dari pengusaha-pengusaha. Duduk bersama, dicari jalan keluarnya seperti apa, jangan nanti setelah ditetapkan, kemudian menimbulkan gejala-gejolak dan apa namanya, Pak, penolakan-penolakan itu setelah ditetapkan.

Nah, sebelum ditetapkan, saya minta Pak Teten, Perdagangan, saya sudah sampaikan tadi dengan Pak Menteri Perdagangan juga pagi, duduklah bersama, Pak, mencari apa *nih* yang terbaik. Karena kita juga mesti mempertimbangkan perjanjian kerja sama internasional yang sudah kita tanda tangani, *e-commerce*, transaksi elektronik dengan ASEAN *kan*, Pak, ya itu seluruh Menteri Ekonomi sudah tanda tangan. *Nah*, ini jangan sampai apa pun keputusan yang kita ambil nanti jangan bertentangan dengan kesepakatan-kesepakatan yang sudah kita tanda tangani secara internasional.

Tadi saya usulkan dengan Pak Menteri, Pak, dengan Pak Menteri Perdagangan, ini kan sekarang kalau di *e-commerce* ini kita ini *enggak* tahu mana yang produk lokal, mana yang produk impor. Mereka wajib, Pak, untuk menginformasikan, ini produk impor, ini produk lokal, Pak, sehingga yang ilegal itu kita bisa tahu, Pak. *Kan* mereka biasanya pakai label ya, Pak, ya, pakai label-label, *nah*, ini diatur dengan, dengan ininya. Supaya kita, siapa yang ilegal, siapa yang *enggak*, kita juga bisa apa namanya, bisa mengetahui ke depan. Kemudian, karena ya terus-terang *aja*, Pak Teten, yang namanya tren dari *cross border* ini *udah* *enggak* bisa kita tahan, ini *udah*, *you like it or you don't like it*, ya inilah sekarang ini, yang *e-commerce* itu *udah* *enggak* bisa, *enggak* bisa kita tahan lagi.

Nah, kemudian mengenai apa namanya investasi, oh tunggu, yang KUR dulu, Pak. Ini ada, ada, ada rencana dari pemerintah, saya ini kan *cuman* baca di media ya, Pak, ya. Ini saya catat, rencana dari mendengar bahwa akan dicabut kredit macet hingga mencapai 5 M, untuk kredit-kredit macet yang UMKM. *Nah*, tapi ini kan wacana, Pak. *Nah*, saya juga *pengen* tahu, pemetaannya seperti apa *gitu loh*, Pak, wacana ini? Tentunya UMKM juga sudah punya datanya, bekerja sama dengan Himbara kan begitu, Pak. *Nah*, data yang mau, mau kita peraturan yang mau kita buat cabut ini, ya jangan sampai ini tidak merata, Pak, apa namanya, fasilitas yang diberikan oleh pemerintah ini kepada daerah-daerah yang ada.

Kepada Pak Menteri, Pak, ya kita mengapresiasi, tadi sama dengan saya katakan dengan Pak Menteri Perdagangan, upaya dari pemerintah itu, kita tahu *kan* kita kalah di WTO *kan* tadi Bapak ini kan ya kan. Bagaimana mengenai kita harus lawan nih diskriminasi daripada produk-produk Indonesia, sekarang mereka pakai deforestasi kan begitu, Pak, Pak Bahlil ya? *Nah*, ini ke depannya seperti apa? Karena kan alasannya itu, mereka mengatakan, mereka telah melakukan riset, mereka punya data. *Nah*, kita melihat ini sekarang ini kan dari pihak kita *nih*, Pak, saya melihatnya masih kita ini ramai-ramai di media saja. Pak Menteri *ngomong*, Pak Menteri ini *ngomong*, Pak Menteri ini *ngomong*, semuanya bicara di media. Tapi saya tidak bisa melihat langkah-langkah apa yang diambil oleh kementerian-kementerian yang bicara di media

ini. Karena kalau saya, ini memang kita harus melakukan total diplomasi, Pak, tidak bisa kita sendiri. Malaysia terdampak, Thailand terdampak. Bagaimana kita melakukan apa namanya, terpadu *nih*, diplomasi terpadu dengan negara-negara lain, *gitu loh*, Pak, Pak Bahlil.

Nah, kemudian kalau saya melihat mengenai minat daripada investasi ke Indonesia ini cukup besar. *Nah*, memang sekarang ini tergantung kita, bagaimana kita mampu untuk mengelola minat-minat yang datang ini dengan kesiapan kita di dalam menampung investasi tersebut.

Saya rasa demikian saja, Bapak Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Baik, kita ke sebelah kanan, Pak Gde Sumarjaya Linggih.

F- PG (GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.AP.):

Ini pertama kita, *ngomongnya* kita terakhir, karena ada yang *dijagain*, karena ada yang *dijagain*, maunya terakhir, dikasih pertama.

Yang saya hormati Pimpinan beserta rekan-rekan Komisi VI DPR RI, Pak Menteri, Pak Menteri Koperasi dan UKM, Pak Menteri Investasi dan Kepala BKPM yang saya hormati beserta jajarannya,

Yang pertama, ya kita rapat adalah rapat-rapat anggaran, namun saya pikir, anggaran dua kementerian ini sama dengan anggaran Eselon III di Kementerian Kesehatan, di Kementerian PUPR, di kementerian apalagi itu, Diknas, ini bertahanlah, jadi Eselon III, Pak, Bu Evita, Eselon III ini, dua digabung Eselon III, bukan hanya satu, kalau digabung baru Eselon III, itu pun masih lebih *gede* yang Eselon III itu ketimbang ini. Jadi rasanya saya *enggak* perlu bahas soal anggaran ini, *udahlah*, *given ajalah* ini anggaran ini dan begitu juga karena memang kementerian juga dapat *given* dari Menteri Keuangan, seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi.

Saya, kelihatannya saya mau *ngomong* yang dan lain-lain itu, pertama saya kemarin juga *udah ngomong* ke Kementerian BUMN, sekarang saya mau bicara lagi dan beberapa kali saya ungkapkan, ungkapkan ini, mengenai di Bali. Kebetulan ini menjelang pemilu, bukan berarti karena menjelang pemilu kita berkomentar tentang kondisi Bali, tapi kondisi Bali akan sangat memprihatinkan ke depannya dalam investasi utamanya, termasuk tumbuhnya UMKM kita.

Kemarin saya coba telusuri, bahwa *airport* itu kapasitasnya cuma 27 juta penumpang tiap tahun di Bali, Ngurah Rai. Terus kemudian saat ini sudah mencapai 20,6, perkiraannya tahun ini, juta. Kalau waktu masa pandemi, sebelum pandemi, 2019, itu sudah 24 juta penumpang dan naik, dulu itu setiap tahunnya 9% per tahunnya. Kalau sekarang kita bicara 20 juta, anggaphlah kita mulai 21 juta, artinya ke depan ini kalau naik 9% seperti perkiraan yang terdahulu, ini tiga tahun lagi *Airport* Ngurah Rai akan *full capacity*. Artinya ketika *full capacity*, maka tentu akan terjadi nanti perang tarif hotel, satu, karena masuknya susah, yang bangun hotel terus, dan kemudian tentu investasi hotel akan *mandek* kemudian, karena *enggak* ada yang berani yang investasi. Begitu juga akhirnya UMKM dan sebagainya akan terpengaruh semuanya.

Itu katanya, kemarin dari teman-teman di AP I menyampaikan, kalau seandainya bisa di barat itu yang telah direklamasi itu bisa dibangun lagi terminalnya, maka itu akan mencapai 37 juta, tapi investasinya 15 triliun lagi. *Nah*, duit 15 triliun ini *enggak* susah, eh *enggak* mudah kita dapatkan, dari perusahaan sendiri, berat, dari dalam BUMN sendiri, AP I, berat, dari PMN kelihatannya akan berat juga. Maka ada alternatif adalah *airport* di utara yang sudah selalu dibicarakan selama ini, di mana *airport* utara itu ya sesuai dengan Undang-Undang Tahun 2009 Nomor 1, itu memungkinkan untuk swasta membangun *airport* yang di segi *land side*-nya. Karena *air side*-nya sudah dibentuk badan yang Airnav itu, sehingga di *air side*-nya di Airnav, di *land side*-nya adalah di, bisa dibangun oleh swasta.

Yang saya maksud sekarang di sini, kebetulan Pak Menteri ini juga getol sekali masalah pemerataan, betul, Pak Menteri ya? Pak Menteri Investasi, karena beliau selalu memaparkan, "Ini loh sekarang ini investasi *udah* lebih besar yang di apa di luar Jawa ketimbang di apa, di Jawa sendiri". Begitu juga di Bali, saya berharap, ya pemerataannya itu terjadi di seluruh Pulau Bali, itu salah satunya adalah infrastrukturnya membangun *airport* di utara. Karena kalau di selatan terus, saya lihat sekarang ini ada PK, apa namanya, Pusat Kesenian Bali dibangun di selatan, kemudian ada rencana tol, yang tadinya tol itu akan lewat ke daerah utara, ternyata sekarang tol itu Gilimanuk langsung ke Denpasar. Jadi pertumbuhannya, infrastruktur semua terjadi ke arah selatan. *Gini ratio* akan terjadi tinggi, ya *gini ratio* akan terjadi tinggi, sehingga ya kita kan *enggak* mau, pertumbuhan yang tinggi harus ada pemerataan, timbul pelaku baru, kan itu yang, yang paling penting.

Nah, kemudian yang saya lihat juga ada adat istiadat akan tidak terjaga, adat istiadat tidak akan terjaga dan itu akan menyebabkan *decline*-nya daripada pariwisata Bali, karena pariwisata Bali kuatnya adat dan istiadat. Kalau kita bicara fisik, dengan Lombok, kalah. Karena Lombok itu ada yang pasimya sampai seperti merica putihnya, Kuta kalah, *gitu*. Ada ke timur lagi, ada danau Tiga Warna, ada pasir yang *pink*, kalau kita *ngomong* fisik, apalagi ke daerah-daerah Maluku sana, terus daerahnya Pak Menteri juga, Pak Bahlil, bagus-bagus pantainya, apalagi ada Raja Ampat dan sebagainya itu. Tapi kalau kita mau bicara bahwa Bali itu menarik karena ada adat istiadat, *lifestyle* orang Bali yang, *lifestyle* orang Bali ini akan hilang kalau seandainya pertumbuhan yang terlalu tinggi di selatan, yang menyebabkan harga-harga naik ya karena inflasi kan pertumbuhan tinggi, *barengin* dengan inflasi harga-harga naik, yang menyebabkan akhirnya, terutama yang buruh serabutan, pegawai kecil, terus pegawai swasta maupun pegawai negeri yang golongan II/a, dia *enggak* bisa mengikuti inflasi ini, dia *enggak* bisa mengikuti inflasi ini. Dia akhirnya apa? Menjual tanahnya, menjual rumahnya, yang tiba-tiba harganya, kalau di Bali hitungannya 1 are itu 1 miliar, atau sekitar 10 juta per meter. Dia jual itu, akhirnya dia pindah dari, dari Denpasar, dari Badung itu ke daerah Tabanan, ke daerah itu. Yang apa yang terjadi? Dia akan membeli yang 1 juta per meter rumah. *Nah*, ketika dia meninggalkan komunitas, meninggalkan kelompoknya, maka adat dan istiadat itu tidak terjaga, itu satu, bagi orang selatan.

Bagi orang utara dan timur, karena pertumbuhannya rendah, tingkat penyerapan tenaga kerjanya juga rendah. Ketika terjadi penyerapan tenaga kerja rendah, maka itu terjadi urbanisasi, entah jadi satpam, entah jadi pembantu, entah jadi, ke daerah-daerah yang tinggi pertumbuhannya. Apa yang terjadi? Ya tentu komunitas yang di utara dan di selatan juga akan berkurang. Dan sekarang sudah banyak rumah-rumah kosong di daerah Bali Utara, di daerah Buleleng, daerah Karang Asam, banyak rumah-rumah kosong, karena *udah* ditinggalkan. Yang akhirnya meninggalkan komunitas, meninggalkan kelompoknya, ya tentu adat dan istiadat akan

kurang partisipasinya, terjadi di daerah tersebut. *Ah* ini yang ke depan yang saya justru agak takut dengan kondisi adat dan istiadat yang hilang di Bali, pariwisata akan menurun.

Belum lagi kalau terus-menerus begini, terus semua program dan sebagainya di daerah selatan, untuk mudahnya departemen-departemen untuk mengunjungi, ini juga akhirnya menyebabkan pertumbuhan yang sangat tinggi tersebut ya kita mau lihat, nanti ada Betawi yang kedua, orang Betawinya hilang, orang Balinya hilang di selatan, karena terdesak oleh kondisi, apalagi nanti naik PBB naik, segala macam naik, jadi ini, ini *problem* kita.

Agak panjang sedikit mohon maaf, Pak, Pak Martin, agak panjang sedikit karena ini perjuangan daerah dan saya kalau berjuang ini selalu dibilang ini, *wah* ini menjelang pemilu, *enggak*, kita bicara apa adanya, kondisi riil yang terjadi *gitu*. Kemudian saya dapat akses, kemudian akibat saya berjuang mendapatkan *excess* politik, ya itu saya syukuri *gitu* loh, bukan berarti menolak, *kan gitu* itu.

Jadi itu harapan saya, mudah-mudahan nanti tidak ada yang berpikir bahwa ada *airport*, nanti adat dan istiadat hilang, *enggak*. Justru kalau *enggak* ada *airport* lagi untuk pemerataan, di situ akan terjadi hilangnya adat-istiadat di daerah selatan, tidak berpartisipasi orang Bali di, di utara dan di timur juga begitu.

Itu Pak Menteri, mudah-mudahan skala besar yang menjadi teropong Pak Menteri tentang Indonesia ini harus ada pemerataan daerah timur, harus segera dibangun, sama dengan di Bali juga. Tidak hanya pembangunan itu di selatan yang selama ini terjadi, tapi tolong, mulai pembangunan infrastrukturnya ke daerah utara dan ke daerah timur.

Itu Pak, saya titip, Pak Menteri dan Pak Menteri Koperasi, karena juga menyangkut masalah UMKM kita, Pak, kalau pariwisata *enggak* jalan, UMKM kita juga akan berat juga di daerah Bali tersebut.

Terima kasih, Pak Martin.

KETUA RAPAT (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Makasih, Pak Demer.

Waduh, kalau Bali mengeluh, saya juga bingung, Toba bagaimana? Kita ke kiri, Pak Khilmi.

F- P. GERINDRA (KHILMI):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Terima kasih.

Yang saya hormati Ketua Komisi VI beserta Anggota Komisi VI,
Yang saya hormati Pak Menteri Koperasi dan Pak Menteri Investasi beserta jajarannya,

Jadi saya bangga dengan hasil investasi dari Kementerian Investasi atas kerja keras Pak Bahlil dan saya bangga juga dengan hasil kerjanya Pak Menteri Koperasi, Pak Teten. Tapi saya baru tahu, Pak Teten, kalau Kementerian Koperasi itu anggarannya tidak boleh melebihi

dari berapa triliun, *gitu*, ya, kelasnya lain-lain *gitu loh*. *Gimana* Pak, itu kelas apa menterinya, Pak, jadinya? Kelas tiga ya? Saya baru tahu. Jadi makanya *kenapa* kementerian yang berimbas dengan pertumbuhan ekonomi *kok* anggarannya kecil, terus *tak* tanya-tanya *kok* ada kelas-kelasnya. Jadi ini masih kelas TK katanya, jadi *enggak* boleh *nih*, harus ditingkatkan ini, Pak, ke perguruan tinggi ini, karena TK langsung perguruan tinggi, *enggak* boleh *nih*. Masalahnya apa ya, *kayak* program KUR, seharusnya itu kan terpusat di Kementerian Koperasi dan UMKM, Pak, namanya *udah-udah* itu. Tapi *kenapa* Kementerian Agama *bikin* KUR, Kementerian Dalam Negeri *bikin* KUR, semua KUR. Ini kan harusnya terpusat di di *tempate* Bapak, *gitu*. Makanya ke depan ini, cara meningkatkan dari TK ke perguruan tinggi ini *kayak* apa, Pak? Kita harus dikasih tahu ini, biar nanti kita kalau membahas anggaran, kita usulkan kelasnya perguruan tinggi.

Dan program-program dari Kementerian Koperasi, masalah ini, Pak, ya masalah Pertashop. Pertashop itu jangan nelayan *aja*, Pak, petani tambak dan petani padi itu juga membutuhkan bahan bakar yang sangat besar *gitu loh* dan dia itu belinya kan sangat susah, Pak. Kalau nanti dia itu membutuhkan untuk *handstractor*, untuk pompa air, itu *kan* juga memerlukan Pertashop *gitu loh*. Jadi nanti pendataannya mungkin *kayak* yang ada di perikanan tapi itu lewat hektaran tambak sama pemilik tambak, *kan gitu*, KTP-nya. Jadi harapan saya ini jangan, jangan di bidang nelayan *aja*.

Jadi saya berharap, koordinasi antar kementerian ini jalan, Pak, karena saya selama delapan tahun di Komisi VI ini, sinergi antar kementerian ini sendiri-sendiri, makanya banyak dirjen-dirjen yang ketangkap di Kejaksaan, *kan gitu*. Kebijakan dari Kementerian Pertanian ini, Perindustrian ini, nanti di Kementerian Perdagangan punya kebijakan ini, "Oh kamu menyalahi dari kebijakan Kementerian Pertanian", jadi masalah. Jadi harapan saya, sinergi itu harapannya harus sangat bagus *gitu loh*, supaya tidak ada permasalahan di permasalahan hukum di belakang hari.

Terus di Investasi ini, torehan yang sangat bagus, tapi ini *kan* juga harus dibarengi dengan kebijakan-kebijakan, Pak. Karena *kenapa* industri-industri yang bahan bakunya banyak dari luar negeri, Pak, itu banyak tidak bisa bersaing dengan industri-industri yang ada di luar negeri. Ini Pak Bahlil *kan udah* mulai industri hulu ini *udah* dibentuklah, tapi *kan* belum semuanya industri hulunya ini terbentuk. Masih hampir 70% itu masih banyak impor, barang barang baku itu, misalnya industri hulu dari farmasi, itu di sini *kan* belum ada, Pak, sini ini *kan* hilirnya *aja* yang di, di apa itu, dikerjakan. Industri hulunya dari India, datang di sini, diolah jadi obat-obatan. Kemarin bermasalah, banyak bayi yang keracunan ya, karena salah apa, salah apa *sih* kita *enggak* tahulah, bukan *anu* tapi itu yang harus di *anu*.

Terus, tentang industri yang bahan bakunya banyak dari luar negeri, Pak. Sekarang pabrik-pabrik bumbu masak kita ini, Pak, *udah* banyak tidak bisa bersaing dengan Vietnam, Filipin, *kayak* Miwon, Ajinomoto, Sasa, karena apa? Karena dia bahan baku ke sini, *udah* pajaknya tinggi. Kalau dia ekspor, pasti kalah harga dengan yang ada di Filipin atau di Vietnam. Untungnya, kita ini masih mempunyai sumber daya manusia yang banyak, sehingga pangsa pasar itu sangat besar. Makanya *kenapa* UMKM-UMKM kita ini banyak kalah dengan industri-industri yang ada di China, dengan adanya pemasaran *e-commerce*, setelah orang Indonesia melakukan Tiktok, katanya teman-teman tadi, terus dia mengirim *design* ke China, maka barang-barang yang dibuat di Indonesia ini tidak bisa bersaing lagi. Ini yang harus apa itu, tadi disampaikan Menteri Perdagangan, makanya sekarang saya sampaikan, mumpung ada Menteri Investasi dan Kementerian Koperasi.

Terus yang kedua, Pak, ini yang apa, tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36, Pak, Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengelolaan Sumber Daya Alam. Jadi ini dari 4 DHE, Pak, ini sektornya itu disamakan semua, jadi sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan. Kalau tiap ekspor 250 ribu USD, terus uangnya nanti harus disimpan ke DHE 30%, Pak, ya nanti kalau sektor perikanan ini *kayak* kita punya *cold storage*, kita punya sumber daya manusia seribu, uang yang kita modal kita yang punya cuma 20 M misalnya ini, terus kita sebulan ekspor 2 kali, eh 4 kali, 2.500 eh 250 USD selama 4 kali, berarti uang kita nanti modal kita ketahan *udah, udah* 120% tertahan di DHE selama tiga bulan. Jadi ini kan harus di dibedakan, Pak, mana sumber daya alam ini yang tidak membutuhkan sumber daya manusia yang banyak dan modal kerja yang usaha-usaha ini modal kerjanya yang orang ini punya *enggak* modal kerja yang harus ditahan, misalnya devisanya sampai 120% dari modalnya dia yang ditahan oleh pemerintah. *Nah*, ini kan harusnya, saya kemarin ya, Pak Bahlil, sampai menunggu Bu Sri Mulyani itu turun dari rapat paripurna. Saya tanyakan “Bu, kalau kebijakan *kayak* begini, nanti kalau mengakibatkan perusahaan bangkrut, *gimana?*” ya jawabannya dia enak *aja*, “*Lah* ini nanti dicoba tiga bulan, kalau tiga bulan ada yang bermasalah, ya nanti kita rubah”. *Lah* ini perusahaan *udah* bangkrut, kita disuruh apa, *dirubah*, *kan* repot, jadi ini masalah besar, Pak. Jadi kebijakan pemerintah itu *kan* harus dipikirkan, kalau membuat kebijakan *kayak* ini, ke sana ini terjadi apa, itu harus dipikirkan.

Ini masukan dari saya saja, karena saya masalahnya punya modal cuma 24 eh 20 miliar, saya ekspor 4 kontainer, kalau dilakukan *kayak* begini, ya saya pasti *enggak* bisa jalan, karena apa? Karena saya lakukan *kayak* begini, *lillahi ta'ala*, hidup saya buat orang lain, bisa *nggaji*, *kan gitu*, walaupun itu untungnya tidak besar tapi saya kan bermanfaat bagi orang lain juga *gitu loh*.

Jadi ini mohon disampaikan kalau di rapat kabinet, jadi sumber daya alam ini harus dibeda-bedakan, kalau nikel, batu bara, bauksit, silika, itu *enggak* apa-apa, *lah wong* itu modalnya *dikit*, tinggal *ngeduk*, ekspor, duitnya tahanan banyak, *enggak* apa-apa. Tapi kalau sumber daya perikanan, kehutanan, ini masalahnya banyak yang dihidupi, *gitu loh*, karyawan yang di situ itu. Jadi ini, ini *kan* supaya kita ini *enggak ngakal-ngakal*, oh berarti nanti ekspornya bagi dua 125 ribu dolar sama 125 ribu dolar, *gitu loh*. Jadi ini masukan saja, Pak, dari saya dan mohon perlindungan pabrik bumbu masak-bumbu masak yang di Indonesia itu supaya bisa bersaing di luar negeri, itu.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Walaikumsalam,

Kita ke kanan, Pak Sonny Danaparamita.

F- PDIP (SONNY T. DANAPARAMITA):

Baik, terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Yang terhormat Pimpinan beserta segenap Anggota,

Yang saya hormati Pak Menteri, Pak Bahlil dan Pak Teten, beserta seluruh jajaran,

Saya baliklah, pertama, Pak Bahlil dulu, kalau tadi minta Pak Bahlilnya belakangan, dengan *jokes-jokes*-nya segar namanya aja Pak Bahlil, bahaya dan liar, kalau sampaikan di sini, sementara orangnya lincah juga, jadi paslah, namanya Bahlil. Sederhana saja, jadi Pak Bahlil itu kurang progresif, menurut saya, Pak. Misalkan *kayak gini kan* isu-isu soal Jawa-luar Jawa, itu kan sebetulnya itu isu 25 tahun yang lalu, bahwa kita itu Jawasentris, Jawasentris lebih pada Jakarta. Ini masukan saja, ke depan kalau bisa bukan soal Jawa-luar Jawa, lebih *ngembang* lagi lah, luar Jawanya itu di mana. Kalau teman-temannya di partai dulu itu kalau Golkar itu ada irama suka, misalnya, *gitu*, sehingga ketika di *zoom* kita lebih detail tahunya di mana. Ketidakadilan, tidak adanya pemerataan itu, kita akan lebih bisa *ngerti* lebih detail, Pak Bahlil yang dari Papua, karena sudah cukup belum itu *kan*, investasi di sana.

Kalau tadi, samping saya tadi *kan*, karena Dapil Bali, bicara soal Bali, kelihatan Balinya *gitu loh*, bukan kelihatan *leaknya*, kelihatan Balinya, ah itu dapil saya, nomor urut satu di sini. Jadi sekali lagi, kalau ke depan kalau bisa begitu, Pak Bahlil, jadi mumpung ini masih kecil anggarannya. Jadi tantangan itu dijadikan kita sebagai peluang, kalau masih kecil kontrolnya gampang, memetakannya lebih mudah, sehingga termasuk yang kedua adalah soal pertanyaan *kenapa* investasi yang sudah jalan ini unsur penyerapan tenaga kerjanya belum sebanding? Pernah disampaikan, karena investasi yang terkait dengan padat kerja itu masih kurang menarik. Kurang menariknya karena faktor apa? Saya kira nanti dalam rapat terbatas *kayak gitu-gitu*, begitu, isu-isu *gini* bisa disampaikan, apakah soal upah guru, apakah soal yang lain, atau pun mungkin soal ketidaknyamanan para investor terkait dengan situasi buruh di Indonesia. Saya kira dua itu.

Kemudian ke Kang Teten, pertama ya saya singkat saja terkait dengan teks ini. Misalkan kalau beberapa program prioritas jadi berdasar sandingan anggaran, capaian, program prioritas maupun *progres* realisasi anggaran itu, saya mencermati *highlight* saja, misalkan tentang PLUT. Kebetulan saya kemarin jalan itu yang ada kalau di dekat dapil saya itu di Jember, kalau *enggak* salah. Itu ada PLUT ada dua titik atau *gimana* saya *enggak* ngerti, satu ya itu ya? Satu kemudian *kok* yang ke depan itu ada *new* PLUT *gitu*. Nah, apa ada yang beda atau ada kekurangan dengan PLUT-PLUT yang pertama itu sehingga perlu ada *new* PLUT atau *new* PLUT itu maksudnya yang edisi 2024 atau *gimana*, saya, saya, saya kurang tahu.

Yang kedua, tentang kecilnya anggaran ini ya, Kementerian Koperasi dan UMKM, tapi kalau dalam anggaran ini, kita *pengennya sih* semua nambah tapi bidang kewirausahaan itu lebih, lebih besar. Kalau saya lihat misalkan *problem*-nya sekarang adalah soal koperasi, banyak yang misalkan Indosurya dan sebagainya. Nah, itu kan masuk di Deputy Bidang Koperasi salah satunya adalah implementasi pengawasan koperasi dengan sistem pengawasan. Mungkin nanti secara tertulis bisa disampaikan skema yang ingin disampaikan seperti apa, karena saya dulu pernah melaporkan itu 14 Februari yang lalu, *gitu kan*. Jadi kita itu *pengen* memberikan dukungan soal itu, kita memahami bahwa misalkan koperasi-koperasi simpan pinjam itu *kan* kadang memberatkan, meskipun ada punya negara yang lebih memberatkan lagi, yaitu PMN, tapi itu kan cukup membantu masyarakat pelaku UMKM kita, karena kemudahannya, karena kecepatannya dalam memberikan kredit.

Terus yang lain lagi soal fasilitasi terkait dengan sertifikat. Tadi sempat diskusi dengan Pak Sesmen, saya mendengarkan itu *kan*, masih banyak lembaga, banyak lembaga yang, yang memberikan bantuan termasuk sertifikat halal, *gitu*. Tapi saya lihat, saya sendiri ikut membantu

teman-teman itu, masih agak lama. *Nah, problem*-nya di mana saya kira itu nanti perlu ditemukenali masalah-masalahnya.

Yang lain-lain, saya kira sudah cukup, tapi khusus ada lagi, Dekopin itu anggarannya paling rendah 32% *gitu*, dan ya di antara Anggota Komisi VI saja juga *enggak* ada yang sama *gitu kan* terkait menyikapi Dekopin ini. Tapi ini justru ada, ada penambahan anggaran ke depan, yang paling bagus kalau bisa diselesaikan dululah itu. Saya rasa itu, *makasih*.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Waalaiikumsalam,

Baik, kita ke kiri, Bu Melani Suharli.

F- PD (Hj. MELANI LEIMENA SUHARLI):

Terima kasih, Pimpinan.

**Yang saya hormati Pimpinan dan teman-teman Anggota Komisi VI,
Yang saya hormati Pak Menteri, Pak Bahlil dan Pak Teten, beserta jajarannya,**

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Saya akan ke Pak Menteri Investasi dan Kepala BKPM dulu, tentunya saya mengapresiasi kinerja BKPM pada triwulan II ini semoga akan terwujud capaian 1.400 triliun investasi 2023. Dan saya juga kemarin pada waktu ada sosialisasi BKPM Investasi, saya terima kasih, banyak dari dapil saya, anggota-anggota dapil saya yang banyak UMKM-nya, semuanya terbantu dengan dibantunya mendapatkan Nomor Induk Berusaha. *Nah*, terima kasih dan semuanya senang dengan adanya bantuan yang mereka, sehingga mereka bisa modal untuk berusaha.

Kemudian juga saya hendak menanyakan di sini, tadi Pak Bahlil bilang bahwa investor yang paling besar itu dari Singapura. Kalau di inves, di untuk DKI, DKI Jakarta itu banyak dibidang apa ya, Pak? Apakah hanya gedung-gedung atau apa apartemen, atau apa? Karena kalau di Dapil Jakarta Selatan dan Pusat tentunya tidak ada pabrik, itu mungkin banyaknya dari investor dari Singapura apa, berupa pabrik, kalau pabrik pasti di daerah yang bukan selatan atau pusat. Mungkin ini yang saya akan menanyakan.

Kemudian tentunya sebagai Menteri Investasi, ada kajian yang dilakukan oleh pihak kementerian untuk kemudahan berusaha di Indonesia, tetapi mengapa Indonesia masih di level bawah, kira-kira apa penyebabnya? Saya kira diperlukan strategi dan program yang tepat untuk mengimplementasi aturan turunan dari Undang-undang Cipta Kerja, agar mampu mendorong akselerasi para usaha informal menjadi formal. Bagaimana menurut Bapak dan strateginya, mungkin seperti apa, tapi tentunya kita telah mengapresiasi apa yang semuanya telah dikerjakan oleh Pak Menteri.

Dan untuk Menteri Koperasi dan UMKM, saya mau menanyakan tentang Pak Menteri mengatakan pihaknya bakal membahas *credit scoring* dengan Otoritas Jasa Keuangan untuk

percepatan penyaluran pembiayaan bagi UMKM. *Credit scoring* bukan berarti tidak ada aset dan tidak ada agunan, dan tidak ada kolateral tapi kolateralnya bukan dalam bentuk aset tapi misalnya kesehatan usaha, kemudian kontrak. Yang saya juga tentunya harus mengapresiasi rencana pemerintah, namun saya ingin bertanya, apa itu konsep *credit scoring*? Dan bagaimana maksud *credit scoring* tanpa agunan itu? mudah-mudahan bisa diberikan contoh konkretnya.

Dan juga mengenai peran UMKM, tercatat Desember 2022 UMKM yang telah *on boarding* digital sebanyak 3,1 juta UMKM merupakan hasil kolaborasi Kementerian Koperasi/UKM bersama 26 kementerian/lembaga UMKM. Saya ingin tahu bagaimana rencana percepatan program sinkronisasi basis data koperasi dan UKM di seluruh Indonesia oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil/Menengah RI agar dapat dimanfaatkan untuk mendukung program pemerintah bagi koperasi dan UMKM.

Ada juga indikasi tumpang-tindih penerimaan manfaat program dikarenakan belum ada sistem atau basis data terpadu pengelolaan UMKM. Bagaimana tanggapan Pak Menteri terkait masih belum adanya data yang terpadu?

Kemudian dalam berita media menurut Kepala BPJPH Kementerian Agama menyebutkan, pada tahun 2024 Indonesia berpotensi menjadi pusat industri halal dunia sekaligus kiblat industri *fashion* dunia. Oleh karenanya, kewajiban sertifikat halal yaitu jaminan produk halal, kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal, harus tentunya menjadi prioritas. Yang sertifikat ini dalam berita di media disebutkan "Pelaku usaha yang tidak melakukan kewajiban setelah memperoleh sertifikat halal akan dikenai sanksi administrasi sebagaimana tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan bidang jaminan produk halal. Sanksi bagi pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan yang telah memperoleh sertifikat halal, meliputi peringatan tertulis, denda administrasi paling banyak 2 miliar, pencabutan sertifikat halal atau penarikan barang dari peredaran. Ini mohon terkait sanksi tersebut dijelaskan, karena saya tahu ini para UMKM yang terutama bergerak di makanan dan minuman, itu harus mempunyai sertifikat halal, kalau tidak, akan di denda 2 miliar pada tahun 2024. Walaupun masih satu tahun lagi, mohon penjelasan, karena mereka pastinya *udah* gelisah "aduh nanti jualannya cuma makanan minuman tapi *enggak* ada sertifikat halal langsung ada denda 2 miliar".

Mungkin itu yang saya ingin tanyakan.

Terima kasih, Pimpinan.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Waalaiikumsalam,

Selanjutnya Pak Harris Turino.

F-PDIP (Dr. Ir. HARRIS TURINO, S.H., M.Si., M.M.):

Baik, terima kasih Pimpinan.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi VI,

Yang terhormat, sesuai urutan, Pak Teten Masduki Menteri Koperasi dan Pak Bahlil Lahadalia Menteri Investasi/Kepala BKPM,

Saya mulai dari Pak Teten. Pak Teten, di pertemuan sebelumnya, saya mengatakan bahwa saya tidak akan pernah berhenti menanyakan mengenai koperasi bermasalah. Dari 8 koperasi bermasalah, yang merugikan negara sampai 23 triliun, saya akan menyoroti Koperasi Sejahtera Bersama, karena memang di dapil saya banyak sekali korban Koperasi Sejahtera Bersama. Mohon untuk *update* perkembangannya sampai sejauh mana, karena mereka terus menanyakan hasil pengadilannya seperti apa. Dan kalau memang sudah berkekuatan hukum tetap, bagaimana dukungan dari Kementerian Koperasi, agar keputusannya bisa dieksekusi. Sehingga paling tidak, sebagian dari kerugian yang diderita oleh nasabah bisa dikembalikan.

Mengenai Koperasi Intidana, ini menarik, Pak Teten, karena pengurus Koperasi Intidana juga menghubungi saya dan mengatakan bahwa koperasi ini sudah dinyatakan tidak lagi koperasi pailit. Tetapi pengurus yang baru selalu ditolak untuk melakukan daftar ulang di Kementerian Koperasi. Mohon klarifikasi, sejauh mana kebenarannya dan solusinya seperti apa? Karena kalau tidak didaftar ulang, berarti ini akan menjadi koperasi gelap.

Yang kedua, mengenai rumah kemas, rumah kemas, terima kasih Pak Teten, bahwa di Kabupaten Tegal kita mendapatkan satu rumah kemas yang katanya sebesar 1,8 miliar. Saya *kepengen* tahu atau paling tidak, saya yang ikut memperjuangkan rumah kemas ini dapat *update*, paling tidak ya, sudah sampai sejauh mana, kapan beroperasi? Saya sudah mengumpulkan banyak UKM, terutama UKM di mamin (makanan dan minuman), mereka sudah sangat mengharapkan adanya rumah kemas ini. *Lah* saya tidak bisa menjawab ketika mereka bertanya, kapan rumah kemas ini akan beroperasi? Sehingga mohon untuk di bisa dijelaskan.

Yang ketiga mengenai Solusi Nelayan, solar untuk nelayan. Sudah ada 5 *pilot project plus 2* yang dalam progres dan oleh Kementerian BUMN dan sudah dibicarakan dengan Pertamina, itu sekali lagi, di dapil saya sudah disepakati, 2 untuk Kabupaten Tegal atau Kota Tegal dan Kabupaten Brebes. Sejauh mana dukungan dari Kementerian Koperasi, agar ini bisa segera direalisasikan? Karena kalau mundur lagi, kasihan ini nelayannya, Pak Teten.

Dan yang keempat, Pak, selama ini kan kita banyak sosialisasi, rasanya di samping sosialisasi, ada hal yang sangat dibutuhkan oleh warga yaitu *workshop*, Pak. Pelatihan-pelatihan yang sederhana untuk para pelaku UKM, misalkan pelatihan *ngelas*, ini hal simpel, pelatihan menjahit, pelatihan kecantikan, pelatihan-pelatihan yang lain, sehingga bisa mengurangi pengangguran. Dan ini seharusnya menjadi bagian dari Kementerian UKM. Jadi wujudnya *workshop* dan saya sangat mengharapkan bahwa ini bisa direalisasikan di luar sosialisasi yang selama ini dilaksanakan.

Selanjutnya saya beralih ke Pak Bahlil ini. Pak Bahlil, realisasi investasi, Pak Bahlil, *as of now*, Agustus 48,5%, realisasi anggarannya jauh lebih cepat, 70% lebih. *Nah*, yang menjadi pertanyaan adalah sisa tinggal lima bulan sampai ke Desember, seberapa yakin bahwa angka 100% atau 1.400 triliun bisa tercapai sampai Desember? Apalagi suasana sudah mulai memanas, pergeseran-pergeseran sudah terjadi, pergeseran koalisi Pak Bahlil, maksudnya, dan ini membikin pengusaha juga, *nah*, ini yang sudah deklarasi, pengusaha menunda investasinya, padahal anggarannya tinggal sedikit, Pak Bahlil, ya tinggal 29%.

Yang kedua, Pak Bahlil, tadi Bapak mengatakan bahwa Presiden mengingatkan ketika saya dilantik, tentang investasi yang berkualitas dan di definisikan investasi yang berkualitas

adalah komposisi antara penanaman modal asing dan dalam negeri, antara Jawa dan luar Jawa. Rasanya ke depan, kualitas sebuah investasi juga harus dilihat dari seberapa banyak investasi itu mampu menyerap tenaga kerja, seberapa banyak investasi itu mampu meningkatkan GDP Indonesia. Dan yang jauh lebih penting, Pak Bahlil, seberapa besar kontribusi nilai tambah investasi itu dinikmati oleh Indonesia? Beberapa pengamat mengatakan bahwa di dalam industri hilirisasi nikel, sebagian besar nilai tambah dinikmati oleh investor asing. Saya tidak punya datanya, saya bukan ahli di nikel, sejauh mana kebenaran ini? Presiden sudah membantahnya di dalam pidato 16 Agustus, bahwa nikel terjadi, setelah hilirisasi, terjadi kenaikan ekspor yang luar biasa. Tetapi karena basis angkanya dari kecil sehingga kelihatannya luar biasa, tapi sebenarnya kue, madunya itu yang menikmati siapa? Dan ini tugas Pak Bahlil untuk memastikan bahwa madunya ada di Indonesia.

Yang terakhir, Pak Bahlil, Pemerintah kan berjanji, bolak-balik mengatakan bahwa akan menghentikan operasi PLTU yang berbahan bakar batu bara dan akan beralih ke energi yang baru dan terbarukan. Sudah menandatangani penyusunan *comprehensive investment plan*, ya, pada tanggal 16 Agustus, yang intinya adalah mengurangi emisi karbon sampai 290 juta ton disektor kelistrikan. Bauran energi ditargetkan 34% pada 2030 dan penutupan 13 PLTU oleh ESDM. Kalau ini semua dijalankan, maka harapannya ada duit masuk sebesar 300 triliun dari negara-negara maju, dari badan-badan dunia yang merupakan bantuan dana transisi energi bersih, tapi faktanya adalah munculnya, disetujuinya, izin investasi PLTU baru, terutama PLTU *captive* untuk *smelter*, yang khusus untuk *smelter*. Dan ketika ini ditanyakan, mereka mengatakan bahwa ini untuk mengamankan capaian investasi. Saya tidak tahu apakah ini dari Menteri Investasi atau dari ESDM, atau dari mana? Karena berarti tidak ada konsistensi antara sasaran bauran energi di 34% dengan munculnya baru, memang *captive*, Pak, jadi hanya *dedicated* untuk satu jenis industri. Apakah memang PLN-nya *endak* siap di sana, sehingga harus bangun PLTU baru? *Nah*, kalau PLN-nya tidak siap seharusnya Kementerian Investasi kan bisa membangun pembangkit yang bersih, yang *green*. *Nah*, saya tidak tahu sejauh mana apakah ini melewati kewenangan Pak Menteri atau masih ada di dalam ranah kewenangan Pak Menteri, cuma ini harus menjadi satu perhatian.

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Walaikumsalam,

Baik, dari Pak Harris, kita ke Fraksi PKS, Pak Rafli.

F- PKS (RAFLI):

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah.

Terima kasih, Saudara Ketua, teman-teman Anggota,
juga Bapak Menteri, Bapak Menteri Teten dengan Bapak Menteri Bahlil,

Yaa Allah, limpahkan kesehatan lahir batin, Aamiin.

Saya ke Pak Bahlil dulu. Pak Bahlil, kita bersyukur kepada Allah, karena WTP Pak Bahlil tadi menggembirakan, indah sekali. Saya bawa isu dapil, Pak Bahlil. Sebagaimana diketahui sejak berlakunya MoU Helsinki dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh 2006, bahwa Aceh memiliki kewenangan untuk mengelola segala bentuk sumber daya alam sendiri. Namun fakta yang terjadi saat ini, pemerintah pusat masih memonopoli kebijakan perizinan melalui beberapa investasi pertambangan asing di Aceh. Menurut saya, ini jelas merugikan Aceh, dari sisi tidak terjadinya pola kerja sama secara horizontal antara pemilik investasi dengan Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah. Seperti saat ini Aceh sudah memiliki PT Pembangunan Aceh, sehingga dalam praktiknya, perusahaan asing tersebut merasa tidak berkewajiban untuk melaporkan hasil eksplorasi dan eksportasinya secara horizontal ke Pemerintah Aceh, serta pengawasan terhadap penemuan besaran potensi dan cadangan akan lebih obyektif. Tidak seperti saat ini, hanya perusahaan asing dan pemerintah pusat yang memahami hal itu, ini penting untuk dibantu menurut saya. Karena *kenapa*? Kalau bicara migas, di sana sudah ada regulator yang namanya BPMA (Badan Pengelola Migas Aceh). Kita memberikan ruang yang sebesar-besarnya kepada investasi. Siapa pun boleh menjadi operator, tetapi wilayah pengawasan dan koordinasi tetap kembali ke BPMA, itu khusus migas. Aceh menginginkan agar tumpang-tindih izin selama ini yang dilakukan oleh pemerintah pusat terkait pertambangan di Aceh, harus dikembalikan sesuai dengan bunyi isi Undang-Undang Pemerintahan Aceh, Pak Bahlil sudah paham itu.

Contoh kasus, Pak Bahlil yang terhormat, seperti PT Emas Mineral Murni, PT Aceh Woyla Mineral, dan PT Linge Mineral Resources. Semua itu merupakan berstatus penanaman milik asing yang tidak korporat dengan *stakeholder* dan pemangku kepentingan yang ada di Aceh. Padahal Aceh sendiri memiliki perusahaan milik daerah yang sudah siap menerima dan menggelar karpet merah bagi semua investasi luar negeri yang ingin melakukan pengelolaan mineral dan batu bara di wilayah Aceh, intinya Aceh sudah siap. Mungkin Pak Bahlil bisa menginstruksikan ke Pemerintah Aceh untuk membangun satu badan pertambangan seperti BPMA juga *gitu loh*. Jadi saya melihat potensi sumber daya alam yang ada, khususnya minerba, ini belum terkelola secara optimal, baik itu tambang-tambang ilegal yang hari ini terjadi gesekan-gesekan sosial yang sangat luar biasa di Aceh.

Saya yakin sekali dengan kelincahan Pak Bahlil, keberadaan Pak Bahlil, ini menjadi suatu, satu kebijakan, satu *legacy* yang monumental, bagaimana Aceh bisa kita bangun dengan baik, jadi tidak ada lagi istilah Aceh itu disebut daerah termiskin, begitu, padahal sumber daya alamnya sangat banyak. Itu harapan saya kepada Pak Bahlil, mudah-mudahan di masa yang singkat ini Pak Bahlil bisa meninggalkan *legacy* itu untuk Aceh, itu *aja* untuk Pak Bahlil.

Kalau untuk Bapak Menteri Koperasi, saya mengapresiasi program-program baiknya terutama tentang SPBUN ya, *nah*, ini sangat membantu. Sudah ada satu di Aceh Besar, harapan saya, ada beberapa titik lagi bisa kita bangun di sana, itu sangat membantu masyarakat.

Terima kasih, Ketua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Waalaiikumsalam,

F- PKS (RAFLI):

Merdeka!

KETUA RAPAT (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Merdeka.

F- PKS (RAFLI):

Takbir, Allahuakbar.

KETUA RAPAT (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Aamiin.

Oke, kita lanjut. Sekarang kita dengar dulu suara perempuan, Ibu Mulan Jameela, terakhir-terakhir.

F- PKS (RAFLI):

Mungkin nanti kampanye Amin, baru nanti kita mainkan.

KETUA RAPAT (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Silakan, Bu Mulan.

F- P. GERINDRA (MULAN JAMEELA):

Iya, terima kasih, Pak Ketua.

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

F-PKS (RAFLI):

Waalaiikumsalam,

F- PG (NUSRON WAHID):

Suaranya *udah enggak* asing ini ya.

F- P. GERINDRA (MULAN JAMEELA):

Enggak asing, Pak, karena orang Indonesia asli, Pak, bukan orang asing. Iya baik.

Yang terhormat Pimpinan Komisi VI,
Bapak-Ibu Anggota Komisi VI,
Yang terhormat Bapak Menteri Bahlil,
Bapak Menteri Teten,
beserta seluruh jajarannya,

Terima kasih atas waktunya. Di sore hari ini saya mencoba untuk mendalami dan bicara dari hati ke hati bersama Bapak Menteri Teten, sesama orang Garut. Ya, Pak, terkait koperasi yang ada di Indonesia saat ini, seperti yang kita ketahui bersama, koperasi ini merupakan soko guru perekonomian nasional yang memiliki corak khas dengan budaya dan karakter bangsa Indonesia. Sebagai fondasi ekonomi Pancasila dan pilar perekonomian Indonesia. Menurut Mohammad Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia, koperasi merupakan bentuk dari demokrasi ekonomi yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat, yang berarti usaha bersama guna memperbaiki atau meningkatkan kehidupan atau taraf ekonomi yang berlandaskan azas tolong-menolong. Namun ironisnya, keadaan koperasi Indonesia ini pada saat sekarang ini, nampaknya kurang baik atau memprihatinkan. Dan tercatat juga terdapat 8 koperasi yang bermasalah dengan jumlah potensi kerugian mencapai 26 triliun. Yang ingin saya tanyakan, Pak Teten, dari kerugian 8 koperasi mencapai 26 triliun ini baru terbayar 3,4 triliun. *Nah*, apa saja upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan bagaimana proses selanjutnya di PKPU? Jangan sampai *kayak* beritanya *udah* hilang begitu saja atau memuai, karena ini menyangkut masyarakat, uang masyarakat, kepentingan masyarakat, dimana nasibnya adalah masyarakat.

Dan yang selanjutnya adalah saya kalau setiap ke dapil itu, Pak, masyarakat sering *banget curhat* sama saya, terutama di Kabupaten Garut, marak *banget* koperasi apa, rentenir berkedok koperasi simpan pinjam, dimana-mana, Pak. Jadi selama ini kan dulu itu ada *bank emok*, *bank emok* itu kata lain dari rentenir ini. *Nah*, ini di dibungkus dengan kata-kata mereka ini bukan *bank emok*, lagi tapi koperasi, ternyata ya *bank emok* juga, rentenir juga itu. Apa tanggapannya dari Kementerian Koperasi? Dan apa-apa saja yang sudah dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan terkait hal ini?

Yang selanjutnya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, terdapat 127.846 unit koperasi aktif dengan volume usaha sebesar 182,35 triliun pada tahun 2022. Mengingat peran penting koperasi dalam ekonomi Pancasila, maka sudah saatnya koperasi mengenai, koperasi direvisi yang saat ini sedang dilakukan. Revisi Undang-Undang Perkoperasian, *sorry*, revisi Undang-Undang Perkoperasian yang ditargetkan akan rampung tahun ini, Pak Menteri menyebutkan, dalam revisi Undang-Undang Koperasi setidaknya ada tiga hal penting yaitu: satu, otoritas pengawas koperasi, kedua, adanya lembaga penjamin simpanan koperasi, yang ketiga, pembentukan dana talangan bagi koperasi yang mengalami kesulitan. Saya ingin apa ya, menanggapi, menurut kami, untuk Lembaga Pengawas yang poin pertama, tidak perlu membuat lembaga pengawas baru, Pak, karena dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 menjadi P2SK (Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan), pengawasan koperasi sudah dibagi menjadi dua, yaitu koperasi jasa keuangan atau koperasi *open loop* akan diawasi oleh OJK, sementara koperasi *close loop* akan diawasi oleh Kemenkop UKM. Jadi untuk apalagi ada pengawasan yang baru? Takutnya nanti ada biaya-biaya lagi, ada pemborosan-pemborosan lagi. Jadi menurut saya mungkin tinggal dimaksimalkan saja peran pengawasan koperasi yang sudah dibentuk saat ini.

Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya mohon maaf kalau ada kurang-kurang, salah-salah.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Walaikumsalam,

Kita lanjut ke Pak Nasim Khan, *monggo* Pak Nasim, sehat-sehat.

F- PKB (Ir. H. M. NASIM KHAN):

Aamiin yaa robbal alamin, ini kan dari hati, Pak, kecuali *enggak* bisa Fatimah, bukan *oke*, jadi kalau sholat itu kan *wallad dholin*, *Aamiin*, iya makanya, *endak* mungkin kan *wallad dholin*, *oke*, kan gitu.

Terima kasih Pimpinan yang kami banggakan, Bapak Martin dan rekan-rekan Anggota Komisi VI yang kami hormati, Pak Bahlil, Pak Teten, dan seluruh Sesmen dan Deputi yang hadir pada hari ini,

Alhamdulillah kita harapkan menjadi kebanggaan buat kita, kalau kita yang pertama, kita lihat dari pagu anggaran luar biasa sudah naik ini, Pak Martin. Dengan naik, dengan adanya hubungan kerja sama, Pak Teten, Pak Bahlil dengan Komisi VI akan lebih meningkat, realisasi anggaran akan lebih maksimal, ya *kan*. Padahal sekarang sudah di bulan September, Oktober, November, Desember, tinggal tiga bulan, tutup buku Desember ini. Kalau tidak terealisasi kan sayang betul, sayangnya yaitu tentang masyarakat kita yang membutuhkan. *Nah*, ke depan kita harapkan nanti mungkin bisa dilanjutkan, nanti bisa di konsinyering di pembicaraan tentang realisasi, kita bicarakan supaya lebih maksimal.

Sudah tadi teman-teman sampaikan, yang pasti saya ucapkan selamat, Pak Bahlil, sudah berani apa yang diharapkan oleh Presiden kita, Pak Jokowi, melawan WTO, cukup berani, itu luar biasa, ya *kan*, khususnya di hilir kita terhadap nikel kita, ini luar biasa ini bangsa kita, bangsa Indonesia sudah berani menyatakan ini, ini artinya sudah mulai saatnya ada perubahan ini di dalam negara kita, ya *kan*. *Nah*, kita harapkan keberanian ini bisa terciptakan terus, karena sampai kapan, sudah hampir, betul kata Pak Jokowi, hampir 400 tahun kita, hilirisasi kita tidak berjalan dengan baik diambil kesempatan oleh luar. Oleh sebab itu, Pak Bahlil, perubahan ini diperlukan oleh Pak Bahlil dan Insya Allah ke depan akan lebih baik dan semoga ini konsisten, itu kita yang harapkan, ya *kan*. *Aamiin* ya Allah, itu yang kita harapkan, *Aamiin*. Itu, itu yang kita harapkan, terima kasih, Pak Bahlil, selamat saya ucapkan.

Dan juga, Pak Teten, koperasi yang kita harapkan menjadi soko guru bangsa ini benar-benar terjadi sudah berkali-kali saya sampaikan dan pagu sekarang naik. Di sini ada beberapa yang mungkin nanti perlu dijelaskan oleh Pak Teten, tentang koperasi modern, *nah*, ini, ini baru ini, kita mendengarkan koperasi modern. Ini perlu kita menjelaskan dan kita berharap pagu di kewirausahaan juga semakin meningkat, karena masyarakat sekarang langsung menerima dengan pagu kewirausahaan. Ini sangat bagus ini, sangat diterima oleh masyarakat dan terus berkembang. Dan terbukti bisa dicek di dapil saya, kebetulan saya Jawa Timur III, ya, Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi, yang bisa dianggap dibandingkan beberapa kabupaten lain maju ya, dibandingkan kabupaten lain, kecuali Banyuwangi mungkin sudah bagus ya, tapi Situbondo, Bondowoso, perlu terus di *support* agar lebih maksimal. Kewirausahaan ini perlu dimaksimalkan, kewirausahaan nasional ya, Pak Teten, ya.

Saya kira *enggak* panjang lebar, cuma itu *aja*, nanti kita bahas bersama, semoga dengan naiknya pagu anggaran ini bisa lebih maksimal buat nanti masyarakat dan kerja sama dengan Komisi VI, itu ke depan yang kita harapkan, saya kira.

Terima kasih.

*Wallahul muwafiq ila aqwamith thariq,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Aamiin, ya Allah, wallad dholin.

KETUA RAPAT (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Amin, Ini masih bulan Septembe *udah* panas Komisi VI ini, sabar-sabar, pendaftaran bulan Oktober.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM RI (BAHLIL LAHADALIA, S.E.):

Masih bisa bergeser barang ini, ini Amin sementara, barang masih bisa diotak-atik.

F- PKB (Ir. H. M. NASIM KHAN):

Pak Bahlil, *enggak* usah khawatir, kita masih mau menerima dengan yang lain ya. Jangan sampai ada galau.

KETUA RAPAT (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Jadi Pak Khilmi, katanya di bawah langit ini yang pasti adalah perubahan, di bawah kolong langit, di bawah kolong langit.

WAKIL KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Yang pasti itu perubahan.

KETUA RAPAT (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Iya, yang pasti perubahan.

WAKIL KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Yang *enggak* pasti, itu Cak Imin.

KETUA RAPAT (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Ojo ngono, PKB, ada tanggapan?

F- PKB (Ir. H. M. NASIM KHAN):

Kita akan lihat nanti tentang bangsa Indonesia ini keberaniannya, dalam perjuangan sudah terbukti keberaniannya, ya *kan, gitu*.

KETUA RAPAT (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Oke, oke.

Bapak-bapak, ini sudah hampir setengah lima, tadi agak ini relaks sedikit, biar *enggak* ngantuk. *Nah*, ini juga sekarang terakhir *nih*, Pak Nusron Wahid, biasanya ada tausiahnya ini, Pak Nusron.

F- PG (NUSRON WAHID):

Terima kasih, Pak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Izin sedikit, interaktif dengan Pak Teten, Pak, mohon izin, Pak, KPA penyaluran KUR itu penagihannya masih di tempat Bapak, Pak ya, subsidiya? Masih, Pak, ya? Pak, mohon izin, terima kasih.

KUR ini *kan* dilaksanakan setiap tahun fiskal, Pak, dilaksanakan mulai bulan Januari, tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Januari, demikian terus- menerus setiap tahunnya. Saya mendapatkan informasi Pak, sampai bulan ini, ini tanggal 4 September, PMK, Pak, Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penagihan Subsidi KUR sama penjaminan, itu setidaknya sampai minggu lalu, itu belum diteken oleh Menteri Keuangan, ya *kan*. Kemarin waktu minggu lalu hari Kamis kita rapat dengan Pak Menteri Negara BUMN juga sudah saya sampaikan *concern* itu, tapi karena Bapak sebagai KPA juga tidak ada salahnya, saya sampaikan juga *concern* itu.

Nah, pertanyaan saya, Pak, kalau di dalam draf PMK-nya nanti itu, transaksi yang sudah terlanjur jalan dari tanggal 1 Januari sampai katakanlah hari ini atau katakanlah nanti, saat PMK itu *diteken*, itu nanti dasar hukum pencairannya bersifat *post factum* atau retro aktif, Pak? Karena saya khawatir, nanti ketika bank-bank pelaksana *nagih*, karena ini belum muncul PMK-nya, biasa, nanti Menteri Keuangan atau Dirjen Anggaran beralih, ini membutuhkan *review* terlebih dahulu dari BPKP dan sebagainya, karena sifatnya adalah sudah berlalu atau *post factum*.

Nah, karena itu *mumpung* ini SK-nya belum beredar apa *udah diteken* apa belum, ini klausula tentang apakah itu nanti perlu *review* BPKP yang transaksi *post factum*, ini perlu menjadi *concern*. Karena kalau tidak, kalau itu masih harus *review* BPKP lagi, berarti akan membuat, mohon maaf, semangatnya bank pelaksana menyalurkan KUR itu menjadi berkurang. Karena barang *udah* kewajiban dilakukan, begitu mau *nagih*, lambat, karena harus menunggu *review* daripada BPKP lagi. *Nah*, ini menjadi, padahal kesalahan kelambatan PMK itu bukan karena kesalahan daripada bank pelaksana KUR. Coba kalau bank pelaksana KUR mengatakan, rakyat membuat KUR selama 9 bulan ini, kemudian ditolak alasannya belum ada PMK, tidak dilayani, yang repot kan juga pemerintah, KUR menjadi tersendat selama 9 bulan atau 8 bulan. *Nah*, karena itu mohon ini di *clear*-kan, Pak, karena ini tugas Bapak.

Satu poin *aja* buat Bapak, ini *aja*, saya yang lain-lain, kalau soal anggaran, menurut saya, sudahlah tidak usah kita bahas lanjutan. Kita setuju sebelum dibahas, kalau soal anggaran. *Udah enggak* usah mau macam-macam, ini saatnya main politik, waktunya habis kita rapat-rapat kalau bahas begini-beginian, ini saatnya kita di lapangan, kalau perlu rapat kita percepat, ya *kan*, *enggak* usah terlalu bahas rapat lagi, perlu Eselon I konsinyering bahas ini

bahas itu. Sudah. Kita konsinyering berkali-kali juga *enggak* bisa nambah anggaran juga, untuk apa juga? Itu yang ini, ini yang pertama itu.

Yang kedua, Pak, Pak Bahlil, *I love you*, Pak Bahlil, *nah*, ini begini, Pak Bahlil, ini saya mau tanya serius ini. Ini gara-gara Pak Menteri, ini adinda kita ini terlalu semangat dan terlalu lincah, tadi apa saya baru dapat singkatan anonimnya tadi dari Sonny tadi, Bahlil itu bahaya dan liar tadi ini, ya kan. Ini begini, *gimana* kelanjutan DME itu, yang ada di Sumsel itu? Barang sudah *digroundbreaking* oleh Presiden, semua sorot TV menulis apa, TV itu menyorot siaran langsung, youtube *live*, sosial media *live*, apalagi? *Online* memuat, *kok enggak* jadi ini, tiba-tiba mundur ini investornya itu. Ya kalau memang belum pasti, adindaku, *kenapa* dulu *digroundbreaking* oleh Bapak Presiden? Barang yang sudah *digroundbreaking* oleh Bapak Presiden harusnya kan *udah proven*, sudah matang itu *loh*, tinggal jalan gitu. Ini sudah *digroundbreaking*, Presiden datang ke sana naik helikopter dari Palembang bersama Adinda Bahlil didampingi oleh Gubernur Herman Deru, Gubernurnya Pak Martin Manurung, ya kan, di situ di, saya ada di situ, karena waktu itu lagi mau awal-awal tahun kan lagi mau persiapan. Ya kan ada acara Harlah NU di sana dulu itu, lihat saya di situ. *Kok* tiba-tiba saya dapat informasi, batal ini barang, *enggak* jadi karena *air productnya* mengundurkan diri, investornya. Tolonglah ini kalau bisa di *clear*-kan, ya kan, masyarakat sudah senang di sana menanti, *gitu*. Jadi lain kali kalau memang barang belum matang, jangan terlalu cepat manuver juga untuk ini *digroundbreaking*-kan oleh Presiden. Kasihanlah Presiden kita, Pak Jokowi nanti, seakan-akan nanti *udah meng-groundbreaking* barang *enggak* jadi kan, yang malu kita sebagai pendukung Pak Jokowi. Weh jelas ini Bos, di daerah saya ini 79%, Pak Jokowi, Bos, ya kan. Kalau daerah Pak Bahlil kan Jawa Barat sana kalah masalahnya, tak ada beban. Kita ini 79% Bos, beban kondisi begini ini. *Nah*, karena itu tolong kasih penjelasan, klarifikasi, *tabayyun* yang sejelas-jelasnya, kalau bahasanya Korea Pacul, Bambang Pacul Korea itu mengatakan *seceta-ceta*-nya, supaya *ceta* ini masalah *gitu* kira-kira.

Oke, terima kasih, ya *kan*.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Walaikumsalam,

Baik, dari, ha?

F- PG (GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.AP.):

Dikit.

KETUA RAPAT (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Iya.

F- PG (GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.AP.):

Ini harus dibicarakan masalahnya. Pak, *nambah* sedikit, karena harus dibicarakan terus-menerus, saya hampir 12 tahun ini bicara ini, tapi *enggak nyampe-nyampe*, jadi harus dibicarakan lagi, sehingga jadi yang ke-13 tahunnya saya membicarakan ini, *gitu*.

Pak Teten dari zaman Pak Syarif Hasan sampai ke Puspayoga sampai Bapak hari ini, saya selalu bicara tentang anggaran koperasi ini, di mana adanya di apa, anggaran daripada UMKM ini yang adanya di 17 kementerian itu, Pak, sama di BUMN itu. Jadi tolong juga Bapak jangan bosan-bosan di kabinet untuk bicara ini, Pak, *gitu*, karena kalau saya lihat, eksekusinya terlalu banyak, Pak, soal anggaran ini kalau tidak terfokus, Pak, satu, orangnya itu-itu juga yang bisa dapat, karena di itu, kelompok-kelompok itu juga yang mengerti tentang manajemen. Terus ada persyaratan-persyaratan yang ada, kelompok itu juga. Akhirnya dia menjadi *shopping* ke mana-mana ke 15 kementerian, 17 kementerian itu, belum lagi ke BUMN, karena tidak ada data yang jadi satu. Kalau jadi satu di kementerian Bapak, Kementerian UMKM dan Koperasi, ini *kan* jelas, Pak. *Kan* ini tujuannya juga untuk nantinya terjadinya hilirisasi, hilirisasinya kalau ke itu-itu juga anggaran yang bantuan pemerintah *kan* hanya itu, yang dan kita *enggak* berkembang, UMKM kita. Katanya UMKM kita ini hebat, krisis, diselamatkan oleh UMKM kita, pandemi, diselamatkan oleh UMKM kita. Kita punya sumber daya alam, kita siap sumber daya manusia yang memungkinkan, sangat memungkinkan UMKM kita berkembang. *Nah*, ini tolonglah bicarakan ini, ini saya *udah* 13 tahun ini, 14 tahun malah di kementerian ini, hampir 10 tahun juga saya bicara di, di, di Banggar, soal ini *gitu*. *Masak sih* menyatukan ini, kita tujuan dari mendirikan Kementerian Koperasi dan UMKM jelas, itu pasti itu adalah memfokuskan untuk membantu koperasi dan UMKM. Itu, Pak Teten, mohon maaf, Pak Pimpinan, karena ini memang harus dibicarakan terus, *enggak nyampe-nyampe*, bayangkan, 13 tahun *enggak nyampe-nyampe* juga ini barang.

Makasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Berarti periode di depan, Bapak *aja* Menteri Koperasi, cocok, Pak Teten. Waktu, saya baru ingat waktu, *udah* lewat, sampai jam 5 ya setuju ya?

(KETUK PALU 1 KALI)

Baik, sekarang ke meja Pimpinan, Pak Sarmuji.

WAKIL KETUA (M. SARMUJI, S.E., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Makasih, Pak Martin.

Pertama ke saudara dan sahabat saya, Pak Bahlil, kalau singkatannya tadi apa tadi, saya ragu-ragu mau *nyebut* singkatan, oh bagus, bagus.

Saya kalau baca data Pak Bahlil dari presentasi tadi itu, itu selalu RKP pemerintah, RKP dan arahan presiden itu selalu arahan presiden di atas RKP. Dan kalau dibandingkan dengan renstra, itu juga jauh, arahan presiden selalu melampaui dari renstra maupun RKP. Dan hebatnya lagi, meskipun arahan presiden jauh di atas renstra dan RKP, selalu memenuhi target, *nah*, itu yang hebatnya ini, *enggak* tahu ilmunya dulu dari mana saya ini, perasaan dulu *enggak* berguru ilmu begini, dulu itu. Untuk 2023, RKP pemerintah target realisasinya 1.200 sampai 1.300, tapi arahan presiden, 1.400 dan nada-nadanya ini juga akan terlampaui.

Nah, yang kita belum tahu untuk 2024, Pak Bahlil belum sebutkan, kalau rancangan RKP-nya *kan* sebesar 1.450 sampai 1.650 triliun. Kalau sesuai dengan kelaziman dari tahun ke tahun, di meja Pak Bahlil ini, itu kemungkinannya juga di atas RKP, jadi kemungkinannya di atas

1.650 triliun juga arahan presiden, meskipun di sini belum disebutkan. Pertanyaan saya, dengan anggaran yang tersedia, terobosan apa yang mau dilakukan untuk bisa mencapai di atas 1.650 triliun, kalau itu logikanya arahan Presiden selalu di atas RKP, 2024, terutama. Jadi kita *pengen* tahu ini kira-kira otaknya Pak Bahlil nanti *muternya* ke mana sehingga bisa mencapai 1.650, dengan anggaran yang tersedia.

Yang kedua dengan Pak Teten, Pak Menteri Koperasi dan UMKM, saya beberapa kali ikut sosialisasi tentang perkoperasian, Pak Teten. Dan saya lihat orang sekarang di daerah itu melihat koperasi itu nyaris lemas itu, Pak Teten, benar ya? Saya merasakan *enggak* ada aura, terus mereka bersemangat mau membentuk koperasi. Bahkan perwakilan dinas itu *ngomong*, "Kalau bentuk koperasi, Pak, saya bantu, Pak, penuh, Pak", *enggak* ada yang antusias itu. *Nah*, pertanyaan saya, *gimana* membangkitkan antusiasme supaya mereka itu mau berkop, mau berkoperasi lagi? Kami sudah berusaha meyakinkan, Pak Teten, di dalam sosialisasi itu. Kita bilang, koperasi itu sokoguru perekonomian bangsa, kita bilang koperasi itu badan usaha yang paling sesuai dengan konstitusi kita, Undang-undang Dasar kita, kita bilang koperasi adalah badan usaha yang memanusiaikan manusia, karena orang tidak dihitung dari besarnya modal dan saham tapi dihargai dari orang per orang. Tapi tetap saja tidak membantu kita untuk bisa membangkitkan antusiasme warga negara kita untuk berkoperasi.

Nah, ini kaitannya dengan Undang-Undang Koperasi. Kira-kira desain undang-undang seperti apa dalam kaca mata Pak Menteri, nanti kan ini lagi disusun undang-undangnya, yang bisa membangkitkan gairah kita untuk berkoperasi? Dan kira-kira Undang-Undang Koperasi itu kapan bisa kita bisa mendapatkan surpresnya, sehingga kita berharap melalui Undang-Undang Perkoperasian itu, bangkit antusiasme warga untuk betul-betul menjadikan koperasi sebagai badan usaha yang paling sesuai dengan azas perekonomian kita, sekaligus badan usaha yang bisa menjadi sokoguru perekonomian bangsa.

Barangkali itu, Pak Teten, terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Baik, *makasih*, Pak Sarmuji.

Saya mau menambahkan *dikit*, sebelum saya kembalikan ke mitra kerja. Karena Pak Menteri Investasi mungkin sedang di toilet, saya ke Menteri Koperasi dulu, Pak Teten. Pak Teten, waktu rapat yang lalu, Pak Teten juga menyinggung soal bank yang masih mengenakan kolateral untuk KUR di bawah 100 juta. *Nah*, karena itu pada saat reses yang lalu, saya bertemu dengan khususnya perbankan yang menjadi mitra kerja Komisi VI, Himbara, dan saya tanya apakah ada memang pengenaan? Mereka sumpah-sumpah *tuh*, tidak ada. Lalu saya cek ke lapangan dengan beberapa, juga pada saat saya turun bersama Kementerian Koperasi yang mendapatkan KUR, mereka juga tidak dimintai agunan, sejak, saya tanya "sudah berapa lama?" "Ya sejak kalau rata-rata bilang tiga tahun, empat tahun terakhir atau lima tahun terakhir tidak lagi ada agunan". *Nah*, karena tadi Pak Menteri mengatakan masih ada yang mengena atau meminta kolateral, mungkin bagus juga kalau memang ada buktinya, Pak, artinya yang bisa ditangkalah ya, yang bisa ditangkap oleh Kementerian Koperasi. Kalau itu dari mitra kerja kami di Himbara, supaya kami juga bisa menyuarakan kepada Bank-bank BUMN, kalau memang itu ada. Karena setahu saya, penyalur KUR terbesar adanya di Himbara, harusnya, Pak. *Nah*, jadi menurut saya kalau memang itu betul ya kami juga akan, akan apa, suarakan di sini, karena kita

kan juga selalu rapat dengan Himbara. Tapi kalau kemarin saya cek pada saat reses, ke penerima KUR juga dikatakan bahwa tidak ada lagi yang mengenakan kolateral, tapi kalau memang ada, ya boleh kita mau, mau cek, Pak.

Nah, yang kedua, saya kepada Pak Menteri Investasi, yang pas *udah* kembali ke ruang rapat. Pak Menteri, saya dengar-dengar dari perkembangan yang terjadi, juga pada saat apa *nih*, pertemuan ASEAN ini, Menteri Keuangan ASEAN, ada satu hal yang menurut saya ini wajib untuk kita cermati, soal *global minimum tax*. *Nah*, *global minimum tax* ini yang saya tahu adalah pajak minimum yang dikenakan kepada seluruh dunia kepada korporasi-korporasi yang dia lintas, multi nasional lah, katakan. Tujuannya katanya *nih*, tujuannya oleh lembaga-lembaga internasional, supaya korporasi global ini ya tidak berdomisili di negara-negara yang menjadi *tax heaven*. Tapi menurut saya, dibalik alasan itu juga berbahaya kalau kita ikuti logika ini, karena berarti kita tidak bisa memberikan insentif tambahan untuk kita menarik investasi.

Nah, saya ingin bertanya ke Pak Menteri, karena Bapak Menteri Investasi, dan ini sebenarnya mungkin kebijakan di Kementerian Keuangan ya. Bagaimana posisi Indonesia sebenarnya terhadap isu *global minimum tax* ini? Kalau saya lihat *sih* ini kalau untuk kita sebagai negara berkembang, ini tidak, *enggak* masuklah barang ini.

Nah, yang kedua, Pak Menteri, juga mungkin bisa dicermati konektivitas antara infrastruktur yang dibangun dan investasi. *Nah*, ini ada di Sumatera Utara, contoh di Kuala Tanjung yang sudah dikembangkan sebagai satu kawasan dibangun relnya, ini saya dapat dari masyarakat, tapi katanya sampai sekarang itu rel, jarang yang lewat. Saya tanya ke, yang untuk kawasan pelabuhannya, Pelindo, ya memang muatannya jarang yang masuk. *Nah*, ini kan berarti antara infrastruktur yang dibangun dengan investasi yang masuk, masih belum *connect* dia. *Nah*, ini mungkin perlu dicermati agar jangan pembangunan infrastruktur ini kemudian *gap*-nya terlalu panjang terhadap masuknya investasi. Ya jadi nanti investasinya masuk itu rel bautnya *udah* harus *dikencengin* lagi, *kan* bahaya juga itu.

Saya pikir itu singkat dari saya, dua hal saya kembalikan. Tadi duluan Pak Menkop, sekarang duluan mana? Oke, Pak Menkoplah.

MENTERI KOPERASI DAN UKM RI (DRS. TETEN MASDUKI):

Baik, Pak Ketua.

Saya kira terima kasih, ini banyak masukan, *insight*, dari para Anggota Komisi VI, ini akan memperkaya kita untuk terus dalam pengembangan program dan kebijakan. Saya mungkin beberapa *aja* yang kita jawab secara umum juga, nanti secara tertulis kita akan lengkapi.

Mengenai pengaturan perdagangan secara elektronik, menurut saya ini *urgent* sekali kita untuk segera kita tata. Harus diakui bahwa kita belum memiliki kebijakan nasional mengenai digital ekonomi. Karena menurut saya, kita *enggak* boleh terlambat, ada banyak yang terlambat dan itu kemudian UMKM-nya habis, *e-commerce* lokalnya habis, konsumen juga dirugikan. *Nah*, karena itu maka sebenarnya sudah lama kami dorong agar revisi Permendag Nomor 50 Tahun 2020 untuk 4 aspek, ini sudah kita angkat lama dan memang sudah dirakorkan di dengan di kabinet dan sekarang lagi tahap harmonisasi di Kumham.

Tapi tidak hanya itu, ya, menurut saya begini, kita juga masih terlalu lemah pengaturan perdagangan kita terutama untuk masuknya produk-produk barang konsumsi ya, *enggak* kuat

kita, ya, kalau tarif masuknya, tarif biaya masuknya begitu murah. Ya sementara kalau kita keluar, kita dipersulit, ini bukan soal perjanjian perdagangan, bebas, semua juga sudah menerapkan itu. Tapi kalau kita mau ekspor, saya selalu *ngambil* contoh, pisang lah. Keluar itu kita diminta 21 sertifikat, ada 3 sertifikat yang setiap 6 bulan di *adjust* dua kali, setahun dua kali, ya *udah*. Nah, sementara kita terlalu longgar. Dan kita *enggak* perlu takut, kita ini *market* digital kita itu besar, akan terbesar di Asia Tenggara ya, terbesar lah di Asia Tenggara. 2030 itu sekitar 5.400 triliun. Nah, ini harus kita *protect*, kita bangun infrastruktur internet ya, luar biasa, tapi ini jangan sampai dimanfaatkan oleh produk dari luar. Hari ini penjualan di *online* sudah dikuasai oleh produk luar, ya. Hari ini mungkin kita masih melihat manfaat *e-commerce*, apalagi *e-commerce cross border*, di mana dari pelosok mana pun bisa jualan secara *online*, bisa ekspor. Tapi kalau kita *rubuh*, UMKM kita, nanti seluruh pelosok desa itu bisa diserbu produk dari luar.

Nah, karena itu kita *udah* angkat bahwa retail *online* dari *cross border* langsung ke konsumen, itu kita minta yang bagian dari revisi permendag itu. Mereka masuk dulu impor seperti biasa, baru mereka jualan di *online*. Mereka harus *ngurus* izin, sertifikasi halal, BPOM dan lain sebagainya. Kalau *enggak*, UMKM lokal *enggak* bisa bersaing, ya sementara UMKM lokal kalau mau jualan harus dapat izin BPOM dan lain sebagainya, sementara dari luar *enggak*, masih tulisan China segala macam, *udah* langsung ke konsumen ya.

Nah, ini kan *enggak apple to apple*, *enggak* usah takut. Kita ini *market* kita besar ya, 270 juta penduduk mereka mau dagang di sini, sehingga waktu lalu ketika ada dua *cross border e-commerce* yang menjual pakaian Muslim dengan harga *dumping* saya menyebutnya *predatory pricing* karena ini bukan lagi *dumping* lagi, itu kita panggil, mereka nurut, ya. Mereka nurut. Saya bilang "You mau jualan di Indonesia *enggak*? *Market* kita besar, tapi *please* jangan hancurkan industri ini, ya, kita masih banyak yang tidak bisa *bikin* dari luar, kita perlu impor", nah, ini *enggak nih*, yang sekarang.

Nah, kalau kita lihat misalnya di China sendiri, di China punya kebijakan nasionalnya yang tidak membolehkan perusahaan *e-commerce*, *platform digital*, menguasai semua hal, ya, *enggak* boleh. Kalau medsos, medsos ya, sosial media, sosial media, kalau *commerce*, *commerce* dan lain sebagainya. Nah, kita ini hampir semua bisa nanti masuk ya, nah, itu yang kita, kita masalahkan. Dan saya kira Pak Presiden juga *udah* angkat isu ini. Nah, mudah-mudahan ini saya kira dengan sinergi kita, dengan komitmen kita untuk menjaga kedaulatan ekonomi kita, ini bisa kita sambungkan.

F- PDIP (Dr. Ir. HARRIS TURINO, S.H., M.Si., M.M.):

Izin, Pimpinan.

Ini menarik sekali *statement*-nya Pak Menteri ini. Sepakat kita harus lindungi UMKM kita dan pasar kita besar, sepakat. Yang menarik adalah, jangan takut pasar kita besar, siapa *sih* yang takut, Pak, itu, Pak? Nah, ini kan jadi menarik, kan mestinya teman Bapak juga.

MENTERI KOPERASI DAN UKM RI (DRS. TETEN MASDUKI):

Iya misalnya beginilah, India pun berani menolak *tiktok* misalnya, kenapa kita *enggak*, gitu. Amerika juga melarang *tiktok* misalnya untuk *enggak*, jualannya boleh, tapi *enggak* boleh disatukan dengan media sosial. Nah, di kita, media sosial dia juga jualan. Padahal kita tahu dari survei, dari riset, orang belanja di *online* itu dinavigasi, dipengaruhi oleh perbincangan di media sosial. Nah, ini satu. Nah, apalagi nanti *payment system*-nya sama, sekarang sedang diusulkan,

pembiayaan semua, logistiknya mereka semua, ini namanya monopoli. Saya *enggak* tahu PKPU juga kurang, kurang bunyi ini, ya saya *udah* akan ketemu dengan mereka.

Nah, karena itu ini juga mumpung ada Pak Menteri Investasi, kita usulkan juga agar KBLI 63 1/21 Pasal mengenai soal web bagi tujuan komersil *udah* di ya menjadi 4 atau 5 KBLI. Jadi usul kita seperti China sendiri mengatur, Amerika juga mengatur, yang lain mengatur, kalau India kan *udah* dilarang itu. Kita *enggak* boleh menyatukan sosial *commerce* dengan *e-commerce*. *E-commerce* *enggak* boleh juga punya produknya sendiri, kalau *enggak*, nanti dia menjual produknya dia sendiri, jadi itu harus kita, kita harus atur.

Nah, yang keempat, ini kan yang terjadi *predatory pricing*, yang dijual di sana paling mahal 50 ribu, bayangin *enggak*, pakaian 20 ribu, 50 ribu, kosmetik, *enggak* kuat lokal kita, itu *enggak* mungkin kalau *enggak* ada *predatory pricing*. Karena itu kita minta yang boleh dijual di *e-commerce* minimum harga 100 dolar, ya dan kita *udah* sepakat dengan Pak Mendag soal itu. Itu cara kita paling mudah, iya, yang impor, yang impor, kalau lokal *enggak* ada masalah, yang impor.

Dan saya juga pernah mengusulkan, banyak cara begitu, tanpa harus kita apa, bertentangan dengan prinsip perdagangan bebas. Ya misalnya untuk barang-barang impor, misalnya *enggak* kuat bersaing itu adalah misalnya produk *fashion* ya. Produk *fashion*, produk kosmetik, sepatu, dan itu *enggak* mungkin kita bersaing. Tapi kita ada cara, misalnya berlabuhnya di Sorong lah, Pelabuhan Sorong, sehingga dari Sorong ke Jawa ke Sumatera, masih perlu ongkos lagi, sehingga yang lokal bisa terlindungi. *Udah* begitu nanti pengiriman logistik ke timur jadi murah, karena muatannya bisa dua balik, dari selatan, dari barat ke timur, dari timur ke kita. Sehingga barang di Indonesia Timur akan lebih murah nanti, dan ini kan bagus. Dan itu kebijakan kita, kita punya *territory*, *kok*, itu menurut saya kita harus punya keberanian membuat keputusan seperti itu *gitu*. *Nah*, jadi ini saya kira sedang dilakukan, tapi kami juga sedang *me-review* kebijakan tarif biaya masuk, ya, karena kalau kita *compare* dengan bagaimana luar negeri juga memperlakukan, juga sama, begitu, *nah*, kita, kita akan mengusulkan dua itu, jadi *cross border* itu seperti itu.

Nah, yang kedua, penghapusan kredit macet memang ini sudah menjadi keputusan presiden, target kita sampai 5 miliar tapi prioritas pertama, tahap pertama yang 500 juta, KUR dan ini di Himbara sudah kita hitung 22 triliun. *Nah*, sekarang, iya *write off*, yang *outstanding*-nya dan ini sekarang PP-nya sedang disiapkan oleh Kementerian Keuangan. Ya, jadi ini *udah* dirapatkan juga dengan apa ya, karena ini kredit macet ini di banknya sendiri sudah dihapusbukkan, ya. Memang tidak dihapus tagih. Dan kalau KUR kan 70% sudah ditanggung oleh Jamkrindo sama Askrindo, dan ini juga tidak perlu fiskal, karena pakai dana cadangan bank juga *udah* bisa. *Nah*, ini jadi ini akan mempercepat penyaluran kredit untuk UMKM. Jadi bank juga sulit, karena masih karena apa, SLIK ya, kalau dulu BI *checking*, kalau dulu ya, *blacklist*. UMKM *enggak* bisa minta, bank juga *enggak* bisa menyalurkan. Bahkan data kredit macet yang sudah dibiarkan terus-menerus itu dari sejak '98 ya. Jadi ini sebenarnya perlu keberanian ya, keberanian supaya memang ada solusi. *Toh* juga *enggak* bisa ditagih juga itu ya. *Nah*, ini cukup direspons cukup baik ya dan ini bagian dari solusi bagi kemudahan UMKM untuk mengakses pembiayaan.

Karena itu juga tadi Pak Ketua sudah menyampaikan, memang ada yang tanpa agunan tapi sebagian besar masih sulit, Pak. Saya kan keliling terus, Pak, ke mana-mana, saya *panggilin*, terus komunikasi dengan kepala-kepala dinas, asosiasi-asosiasi, masih sulit, Pak. Jadi karena itu memang mungkin kita harus meniru di penerapan *credit scoring* ya dan ini jauh lebih

amanlah menurut saya daripada pakai agunan berupa aset, karena aset, nilai aset itu kan bisa dimanipulasi. Tapi kalau *credit scoring* itu hampir sulit, karena itu data digital mengenai transaksi dengan *buyer*, dengan *supplier*, dengan pajak, dan lain sebagainya, itu sulit direkayasa ya, untuk melihat kesehatan usaha. Dan ini sudah diterapkan di 145 negara dan bank juga *enggak* usah sulit-sulit, di dalam negeri juga *udah* banyak yang bisa melakukan pengecekan mengenai *credit scoring*. Ya, jadi ini akan, menurut saya ini harusnya disambut oleh bank karena ini sebagai satu *opportunity* penyaluran kredit atau bisnis bagi bank yang sangat besar, ya.

Lalu, *nah*, KUR kita bahas dulu ya, KUR, tadi mengenai PMK ya, saya kira ini Pak Martin karena BPK juga, Pak Nusron tadi ya, saya kira karena ini *udah, udah* terbit PMK-nya, jadi memang ini agak terlambat, karena masih ada beberapa pembahasan mengenai terkait SBDK oleh BPKP dan saya kira *enggak* jadi masalah karena nanti di, di komite KUR itu kan selain kami, juga ada BPKP, ya jadi ini *enggak, enggak* masalah.

Lalu yang Pak Demer, saya kira Pak Demer betul, Pak, jadi anggaran kementerian ini pernah saya bahas ketika saya ditugaskan Pak Jokowi di pertama untuk menjadi menteri, "Pak", saya bilang, "ini waktu itu kan masih 900 miliar, Pak, 900 miliar. "Pak, saya bilang saya disuruh *ngurus, ngurusin* 64,2 juta anggarannya, 64,2 juta UMKM atau 99,9%, anggarannya 600 miliar, eh 900 miliar waktu itu *direfocusing* jadi tinggal 600. *Nah*, ada yang salah", saya bilang, "Coba pelajari", kata beliau. *Nah*, terus beliau minta, bisa *enggak* semua kan ada 42 ada 22 Kementerian yang *ngurus* UMKM ada 42 lembaga. Bisa *enggak* kata Pak Presiden disatukan di satu tempat, di tempat Kemenkop ini? Lalu kami bahas bersama Menteri Bappenas, Menteri Keuangan, Pak Menko Ekonomi. Sarannya memang perubahan dulu undang-undang mengenai kabinet kementerian negara. *Nah*, waktu itu *udah* saya siapkan, tapi keburu Covid, Pak, keburu Covid. Karena kalau saya *ngurus* ini pasti lebih *ngurus* ke internal. *Nah*, sehingga sebenarnya ini mungkin yang harus dilanjutkan ya. Saya kira Pak Demer *udah* 12 tahun, pengalaman di sini cocok *nih* untuk nanti untuk meneruskan ini.

Nah, waktu itu ada beberapa pengakuan lah, testimoni, dari Pak Suharso, waktu itu ada Pak Pramono Anung, ada Pak Airlangga juga, memang ada kesalahan di DPR juga, karena untuk penentuan kementerian utama itu kan harus bunyi di konstitusi. *Nah*, koperasi itu justru bunyi di Pasal 33, *gitu*, malah *enggak*, jadi itu ada kesalahan. Jadi sebenarnya ada argumen yang kuat untuk dinaikkan kelasnya. Ya, jadi saya setuju ini, ini harus kita ini kan, Pak, karena *waduh* saya ini makin rajin ke bawah juga, di bawah *gini* semua, *enggak* cukup anggaran saya, repot saya. Jadi *nah*, akhirnya saya bikin program-program kemitraan, Pak, saya gandeng Pak Erick, iya kan, saya gandeng mana lagi, *nah*, saya gandeng-gandenglah, gandeng semua, *e-commerce* saya gandeng. Kalau *enggak gitu*, Pak, saya *enggak* bisa, *enggak* bisa bekerja ya, *nah* jadi seperti itu.

Lalu mengenai halal, *nah*, ini kita *udah* hitung, Ibu Melani, yang halal itu *enggak* mungkin bisa, sertifikat halal itu kan harusnya selesai tahun 2024, tahun depan. *Nah*, sementara BPJH, BJPH dan kami hitung ini ada 30 juta UMKM yang membutuhkan sertifikasi halal, terutama di industri kuliner dan seperti kosmetik ya, herbal, dan lain sebagainya. *Nah*, dengan rata-rata 21 sampai 25 hari, jadi masih butuh 600 tahun ya, 600 tahun ini. *Nah*, karena itu maka kalau tahun depan itu diwajibkan semua harus punya sertifikasi halal, pasti ini akan diperiksa oleh Reskrim. Sehingga ini harus ada penundaan penerapan ini, karena *enggak* mungkin. Ini harus ada kebijakan mengenai mengefektifkan sertifikasi halal secara *self declare*, itu yang harus dilakukan, jadi kami sedang bahas ini.

Lalu KSP bermasalah, KSP bermasalah ini, memang saat ini masih dalam proses hukum. Kami terus berusaha bersama Menko Polhukam untuk memastikan para pengurus dari delapan koperasi yang bermasalah itu untuk dipidana dan aset-aset pribadi sama aset-aset koperasi yang mereka gelapkan, itu sudah, harus bisa dieksekusi dan dari situ bisa dilakukan untuk pemenuhan kepada anggota koperasi bermasalah, ya karena memang tidak ada mekanisme lain, mekanismenya harus aset *base resolution*. Nah, karena ini masih dalam proses pidananya. Nah, juga termasuk tadi KSP SB, ini juga saya kira baru 4% realisasi pada uang anggota itu dikembalikan. Nah, kita berharap sekarang sedang ada proses pergantian pengurus dan dengan pergantian pengurus ini mungkin nanti lebih *trust* anggotanya, ya untuk, untuk melakukan *settlement aset* untuk mendukung itu, kami akan terus kawal ya, proses ini.

Nah, bagaimana sekarang, tadi yang disampaikan Pak Ketua, Pak Sarmuji, bagaimana ini? Betul, saya kira betul, Pak. Jadi KUR ini, apa, koperasi ini kurang diminati lagi. Nah, kalau kita lihat, sementara perkembangan koperasi di dunia yang berkembang itu selain di pembiayaan adalah di sektor *agriculture* karena ini melibatkan multi pihak. Nah, untuk koperasi-koperasi di sektor riil ini yang kemudian kami sedang prioritaskan, Pak. Jadi nanti misalnya tadi, hilirisasi rumah produksi bersama itu, itu dikelola oleh koperasi karena masih ada perlu agregasi petani-petani kecil, produser-produser kecil, ini harus diagregasi. Instrumen agregasinya dari usaha mikro menjadi punya berskala ekonomi, itu yang paling tepat itu adalah koperasi ya. Nah, jadi yang kita harus pahami bahwa di Indonesia itu, model bisnis koperasinya belum berkembang, Pak, ya yang berkembang baru koperasi simpan pinjam. Karena itu maka kebijakan kami, semua dana penyaluran LPDB nanti akan diprioritaskan untuk sektor-sektor riil. Nah, beberapa *piloting* sudah kita lakukan. Kita juga sedang menginisiasi koperasi multipihak, ini yang juga berkembang di luar, yang memungkinkan koperasi tidak bisa, bisa lebih cepat tumbuh karena tidak apa, kalau secara organik dari anggota ke anggota, ya susah ya, tumbuh berkembangnya. Koperasi juga seperti itu.

Mengenai surpres untuk RUU Koperasi, ini saya sudah mengirim surat ke presiden, sudah paraf, sudah ada tahap harmonisasi, sudah selesai, sudah tahap paraf. Saya kira mudah-mudahan sebelum reses sudah sampai ke DPR ya, ini *udah, udah* cepat.

Lalu ya memang koperasi itu harus diberi kebebasan untuk masuk ke semua sektor. Jadi nanti hilirisasi misalnya yang sudah dilakukan afirmasi untuk sawit, ini juga koperasi, ya. Nanti pengolahan rumput laut dan lain sebagainya, pengelolaan TPI, itu *kan udah* bisa koperasi. Ya nanti saya ingin kerja sama dengan Bapak-Ibu sekalian yang memang ada di wilayah pantura, Tegal, Brebes, Pati ya, itu memang daerah-daerah nelayan, sampai ke Surabaya dari Indramayu, seperti itu. Jadi ini kita nanti kita coba efektifkanlah, Pak, koperasinya nanti kita dukung sistem pembiayaannya, *nah*, itu kita. Jadi Solusi Nelayan itu *kan* koperasi juga, *nah*, walaupun memang tidak, ada juga yang bukan nelayan, itu perlu.

Yang rumah kemasan, ini karena DIPA-nya baru pecah bulan Agustus, Pak Harris, nanti sebentar lagi saya kira *udah* jalan, Pak, ya. Jadi memang rumah kemasan ini kita harapkan memang nanti bisa cukup membantu para pelaku UMKM, terutama di sektor makanan, minuman, supaya kemasan mereka menjadi lebih cantik ya, karena kalau kita lihat misalnya seperti Jepang pun, meskipun ekonominya sudah berteknologi tinggi, tapi urusan oleh-oleh mereka tangani serius. Jadi kalau kita ke Jepang *kan* kemasannya itu *udah* konsepnya adalah *gift*, kado, ya sehingga,

F- PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.):

Izin, Pak.

Berapa banyak rumah kemasan ini dalam anggaran ini?

MENTERI KOPERASI DAN UKM RI (DRS. TETEN MASDUKI):

Tahun ini 13, Bu, tapi ini nanti kita akan terus, Bu, perbanyak, karena kita juga tidak terlalu, karena ini *ngelibatin* daerah ini enggak mudah juga, Bu, jadi *enggak* simpel. Ada soal ini juga, apa, soal SPBU nelayan juga ada kaitan dengan tanah dan lain sebagainya. *Nah*, tahun ini 13, tahun depan ya 20-an, jadi saya kira ini akan cukup membantu memperbaiki kemasan-kemasan UMKM kita dan ini memang kekuatan UMKM kan oleh-oleh, Pak.

WAKIL KETUA (M. SARMUJI, S.E., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Pak Menteri, izin.

KETUA RAPAT (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Iya.

WAKIL KETUA (M. SARMUJI, S.E., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Pak Menteri, jadi dua hal itu memang dirasakan menjadi kebutuhan *banget*, Pak Menteri, di UMKM kita, pertama rumah produksi bersama, kedua rumah kemasan, ya. Kami sudah pernah berdiskusi intens sekali tentang ini. Khusus untuk rumah produksi bersama, saya pikir tidak harus persepsi kita *gede banget* begitu, *enggak*, yang penting itu bisa dimanfaatkan bersama-sama sesuai dengan *cluster*-nya. Dan kalau tadi dihubungkan dengan koperasi, menurut saya itu efektif, Pak Menteri, karena koperasi itu kalau ada kesamaan, misalkan sama-sama berproduksi, apalagi produksinya semisal, itu lebih mudah untuk membentuk suatu koperasi yang kepentingannya sama, pemasarannya sama dan sebagainya. Jadi saya kami mendukung, kalau bisa diperbanyak, Pak Menteri.

MENTERI KOPERASI DAN UKM RI (DRS. TETEN MASDUKI):

Iya, Pak Sarmuji, ini karena yang rumah produksi bersama *kan* idenya bagaimana UMKM bisa mengakses teknologi produksi modern. Jadi kita bikin pabrik modern di mana UMKM bisa maklun di situ membuatnya. *Nah*, jadi memang itu, kita akan perbanyak dan Pak Presiden juga sudah memberi arahan, supaya nambah lagi, Pak. *Kan* kemarin kita minta 3 triliun ya, karena ini beliau minta untuk hilirisasi komoditi-komoditi yang unggulan, ini juga dihilirisasinya lewat koperasi, Pak. Jadi intervensi pemerintah adalah membangun pabriknya seperti itu, jadi mohon dukungannya *aja, gitu*, Pak.

Barangkali itu. Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Selengkapnya nanti kita tertulis.

KETUA RAPAT (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Baik, gantian saya yang lagi makan.

Baik, kita lanjutkan ke Pak Menteri Investasi, silakan, Pak.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM RI (BAHLIL LAHADALIA, S.E.):

Pimpinan dan Bapak-Ibu Anggota Komisi VI yang saya hormati,

Saya tidak akan lama seperti biasanya, karena Pak Teten *udah* cukup membuat kita rasa nasionalismenya tinggi sekali. Tapi sedikit saya mau tambahkan untuk Pak Teten tadi. Itu benar, Pak Martin, *kenapa?* Negara kita ini terlalu bebas hanya karena mau supaya tidak dibilang ketinggalan. Itu *e-commerce* di China itu *emang* semuanya dibuka? *Enggak*. Di India itu lebih parah lagi, kita ini, pasar kita besar, tapi mohon maaf, kita belum seutuhnya untuk memagari produk-produk dalam negeri kita, ini yang dimaksud oleh Pak Teten. Karena memang aturan kita memungkinkan. Bayangkan, orang *bikin* baju harga 50 ribu, padahal kita tahu ini biaya produksinya *enggak* mungkin 50 ribu, mungkin biaya produksinya 80 ribu, tapi *kenapa* dia hajar di negara kita 50 ribu? Karena dia pakai subsidi silang, ketika dia dapat profit dari negara lain, ini yang tadi disampaikan oleh Pak Teten. Jadi Pak Teten, kemarin saya sudah mohon maaf, tanpa aturannya belum ada, aku *udah* perintahkan kepada deputi saya, "Lock itu izin di KBLI *e-commerce* yang datang, tidak dulu didaftarkan, langsung main jualan *aja*, aku *udah* tutup". *Enggak* apa-apa, saya lapor kepada DPR, kalau *emang* orang komplain saya, saya hadapi *aja*. Saya lebih membela rakyat daripada membela 1-2 oknum pengusaha merugikan rakyat UMKM, *udah* cocok barang ini.

F- PKB (Ir. H. M. NASIM KHAN):

Aamiin.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM RI (BAHLIL LAHADALIA, S.E.):

Ibu Evita, jadi kalau suara *wong cilik* itu harus begini, Bu Evita, *gitu kan*. Jadi harus korelasinya dengan regulasi. Jadi Pak Teten *udah* betul itu, Pak. Kalau *enggak*, Pak, habis kita ini, *enggak, enggak*, ini, ini serius ini. Kalau 2-3 konglomerat masih bisa kita ajak komunikasi, tapi ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Habis itu UMKM-UMKM kita, yang pemain-pemain yang cuma *size*, volumenya sedikit, habis itu, setelah itu diakuisisi. Jadi strategi mereka itu adalah kasih bangkrut dulu, *collapse* dulu UMKM kita, baru kemudian dia mainkan *size* yang lebih *gede*, baru harganya dinaikkan. Ini kan saya pikir nanti di forum yang tidak resmi baru kita buka tabir ini, karena ini ada wartawan, tapi cukuplah saya kasih kalian *fooding* wartawan seperti itulah. Ini karena, ini karena suasana kebatinan saya sama Pak Teten sama, soalnya.

Baik, saya lanjut, Ibu, menyangkut dari Ibu Evita tentang WTO, diskriminasi tentang deforestasi. Bu, ini politik dagang, tidak ada negara satu di dunia ini yang *pingin* lapaknya diambil oleh negara lain, *enggak* ada. Ujung-ujungnya kita melihat, ini hanya main di narasi aja tapi substansinya sama. Contoh kalau kita mau buka *beneran*, sawit, ini kan bersaing sama bunga matahari, minyak bunga matahari. Karena sawit itu CPO kita itu lebih murah daripada bunga matahari tujuh kali lipat harganya. Kemudian bagaimana cara penetrasi agar kita tidak masuk? Dibuatlah sertifikasi "Lu punya negara, tahu apa tentang negara kita untuk sertifikasi?" Tapi kita kalah *lobby*, kan. Sama dengan nikel, nikel, *kenapa* kita dibawa ke WTO? Karena industri mereka, yang sudah dibangun, tidak lagi mendapat *supply* bahan baku, andaikan dia mendapat

supply bahan baku, sudah dengan harga yang mahal, maka ketika produk, produknya jadi, itu akan kalah kompetitif harga dengan produk yang kita bangun di Indonesia. Maka kemudian dia pakai lagi beberapa lembaga dunia yang menyarankan kita untuk kemudian mengkaji kembali terhadap izin larangan ekspor komoditas. Hal-hal *kayak gini* menurut saya *enggak* bisa kita tolerir. Dan Bapak Presiden Jokowi memerintahkan kepada kita, kami anggota kabinet untuk melawan yang *kayak* begini-begini. Dan saya konsisten untuk menjalankan gagasan daripada Bung Karno, harus berdikari dan mandiri ekonomi kita. Ibu Evita, ini koalisi baru ini, jadi itu Ibu Evita, jadi apa yang kami lakukan ini sudah sejalan dengan *roll* partai Ibu, dan *endak* perlu lagi dipertanyakan, itu sebenarnya, sekalipun doktrin karya-karyaan itu dilakukan oleh Golkar, *gitu kan*.

Kemudian dari Pak, Bang Demer, saya akan menyampaikan kepada Pak Erick, memang mau tidak mau kita harus bangun *airport* tambahan, infrastruktur tambahan di Bali, kalau tidak, itu terjadi ketimpangan, itu benar itu, itu benar. Dan saya akan bicara sama Bang Erick secara khusus dengan menyangkut ini, mudah-mudahan dia dengan Golkar baik-baik saja. Kita kan mendoakan, Pak Sarmuji.

Pak Khilmi, menyangkut dengan bahan baku, farmasi, memang 70, bukan 70%, 90% bahan baku farmasi itu masih kita impor, alat kesehatan kita 70 sampai 80%, ini kita buka *aja*, jangan kita turun-turunin kalau informasinya benar. Bila perlu, kalau memang 100%, kita ngomong saja, supaya jangan ada dusta di antara kita. Ini terjadi karena memang jujur saja, pertama adalah bahan bakunya ini memang di kita ini mungkin banyak tapi penelitiannya yang mungkin masih kurang, itu, jadi mau tidak mau kita impor. Kemarin di, di Covid itu membuka tabir itu semua dan mulai kemarin pasca Covid kami mendorong kepada sektor kesehatan untuk membangun ini. Jadi memang kita masih membutuhkan industri hulu dalam bagaimana caranya membuat bahan baku termasuk DHE, memang ini masukan untuk kami juga. Kita tidak bisa menyamakan antara komoditas batu bara, CPO, dengan perikanan. Ini benar ini Pak, Pak Khilmi tentang dana hasil ekspor. Tetapi jangan bermimpi untuk DHE dari hasil industri, itu akan kembali seutuhnya ke Indonesia, *kenapa?* Karena tidak mungkin industri yang dibangun, contoh melakukan hilirisasi sektor nikel. Semua kreditnya *kan* kredit dari luar, teknologinya teknologi dari luar, begitu ada hasil penjualan *revenue* mereka, yang mereka lakukan pertama, apa? Membayar pokok tambah bunga dari pinjaman mereka, yang kembali ke kita berapa? Paling tinggi 20-30%, itu pun hanya untuk operasional, karena profitnya berapa? 5-6 tahun kan belum terjadi *break event point*. Jadi kalau kita mau, untuk DHE seutuhnya kembali, yang sering dibilang bahwa kalau Pak Presiden memberikan pidato ekspor nikel 30 billion lebih hampir 510 triliun, tidak kembali ke kita, itu bukan tidak kembali karena tidak mau dibawa, bukan, 30 sampai 40% bisa kembali, tetapi selebihnya dia harus bayar pokok tambah bunga, itu untuk industrinya. Tapi kalau untuk tambangnya, penuh kembali ke Indonesia. Jadi biar datanya harus *clear, gitu*, jangan satu contoh oleh pakar ekonomi A, kemudian kita *ikutin* semuanya. Contoh katakanlah harga nikel, dibilang bahwa kita cuman 45 dolar *plus* 3 di luar 80 dolar, itu kan kerugian, macam mana cara hitungnya? Pajak ekspor kan 15%, 10 sampai 15%, biaya logistik pengiriman 12 dolar. Logistik penguatan berapa? Kalau dihitung-hitung itu 70 dolar, 75, *masak* orang *enggak* boleh untung 5 sampai 10 dolar untuk *trading*, jadi sama *aja* sebenarnya, itu menyangkut dengan DHE. *Mak ngeri* kali itu.

Menyangkut Ibu Melani, yang tadi, yang masuk ke Jakarta itu adalah investasi di bidang gedung, perkantoran, perumahan, jasa dan perdagangan, konstruksi, hotel dan restoran, serta transportasi, gudang, dan telekomunikasi. Tidak ada industri, tidak ada. Ini yang masuk ke Jakarta dan itu nomor dua *loh*, Bu, PMA terbesar nomor dua ya? PMA maupun PMDN, kalau tidak salah, PMDN nomor lima besar, ya.

Kemudian, *nah*, ini memang pertanyaan profesor ini, kita kadang-kadang ngeri-neri sedap, dari Pak Harris. 70% anggaran sudah dicairkan namun realisasi investasi kita baru 48,5%. Apakah dengan 48,5% ini bisa tercapai 100%, 1.400 triliun, sementara anggarannya tinggal 30%? Ya nasib orang kampung jadi menteri, ya begini, suka dikasih target besar, uangnya dikasih kecil, mungkin karena Pak Teten juga dari Jawa Barat, di kampung, saya juga dari Papua, jadi dibuat begini. Tapi ini kan menguji integritas, loyalitas sayang kita kepada republik ini sebenarnya, ya *kan*, kita ini telah diuji. Jadi sebenarnya yang cinta dengan republik ini, tokoh-tokoh yang memang pernah berjuang dari kampung, *gitu*. Jadi bagi saya, uang itu penting, tapi dalam konteks ini saya mempertaruhkan dengan tim saya segala-galanya, untuk bisa mencapai target 1.400 triliun. Goreng dulu, goreng.

WAKIL KETUA (M. SARMUJI, S.E., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Jangan lupa, jangan lupa yang *ngasih* operan bola tadi itu, ya.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM RI (BAHLIL LAHADALIA, S.E.):

Oh iya tenang, itulah kecerdasan Golkar itu. Itu menyangkut Pak Harris. Jadi *Insyallah*, Pak Harris, akan tetap kita lakukan, sekalipun memang ada pertanyaan kritis adalah harusnya *kan* berbanding lurus antara hilirisasi investasi dengan tenaga kerja. Dulu tahun 2014, mohon maaf tolong dikoreksi karena saya sudah tidak kuliah waktu itu, 1% pertumbuhan ekonomi itu mampu menciptakan lapangan pekerjaan 250 ribu sampai 300 ribu, dan 2014 terjadi defisit de-industrialisasi, karena itu didorong itu adalah investasi yang padat karya. Tujuan kita waktu itu adalah bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan, *it's oke*. Tetapi 2017-2018 terjadi perubahan. Karena kalau kita cuma hanya mendorong investasi padat karya, maka tetap defisit neraca perdagangan kita akan terjadi, karena tidak ada proses nilai tambah yang masif di situ. Menurut teori ekonominya Pak Prof, itu semakin banyak, semakin tinggi nilai tambah yang dilakukan, maka ekspor, nilai ekspor kita juga akan semakin baik untuk mengukur neraca perdagangan kita. *Nah*, karena itu saya terjemahkan dalam dasar pemikiran itu, di tahun 2019 akhir, kita membuat rencana bahwa investasi yang dibangun itu yang berbasis teknologi tinggi, tapi kita *blending* dengan padat karya. *Endak* mungkin kita mau pakai padat karya mau bangun *smelter*, Bos, terkecuali dia *supplier*. *Enggak* bisa, kita *enggak* bisa lagi berbicara ini barang sudah di bulan, kita masih turun antara hidup dan mati, *enggak* bisa. Maka kemudian yang kita lakukan sekarang itu adalah apa? Kolaborasi sebenarnya. Karena pada *medium small* dari jenis usaha yang bisa dilakukan oleh teman-teman kita, daerah, itu yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan.

Kalau kita mau jujur ya, lapangan pekerjaannya paling banyak kerjanya Pak Teten. Dari total 131 juta lapangan pekerjaan, 120 juta itu UMKM, GDP kita 60% dari UMKM, jumlah unit usaha 99,6%. Tapi ya itu, Pak Teten cuma dikasih beban, apa, membiayai bebannya cuma segitu itu. Tapi ya sekali lagi, karena Pak Teten dari Garut jadi enggak apa-apa gitu, *nerimo* lagi, *gitu kan*, itu. Jadi sekali-sekali itu coba anggaran itu dibuat itu coba yang apa ya, *make sense gitu loh*, ini kan isu-isu kerakyatan *gitu loh*, ini, ini isu-isu kerakyatan, untung *aja* saya di pemerintah tidak oposisi, eh jangan dikutip, wartawan.

Kemudian Pak Rafli, nanti saya jawab khusus ya menyangkut otsus. *Nah*, ini menyangkut Pak Nusron, menyangkut dengan DME, *enggak* usah, Bu, ya? Pak Nusron, mohon maaf saya mengikuti perintah PDIP. Kamu Anggota DPR dari Golkar, jadi saya tidak perlu jawab,

kata Ibu menteri kita, kata Ibu Evita, ya Bu ya? Kalau Pak Nusron marah, bilang PDIP intervensi Golkar, ya.

Kemudian Pak Sarmuji, Pak Sarmuji ini paling pandai sekali dalam membaca data saya. Memang dari dulu, Pak Teten, waktu saya masih aktivis bareng sama Pak Sarmuji, itu beliau memang teliti sekali dalam membaca data dan saya harus akui bahwa kecerdasan akademik beliau di atas rata-rata saya, cuma saya jadi menteri duluan, tapi dia jadi. Jadi kecerdasan akademik itu tidak menjamin kecepatan dalam karir di pemerintah, sekalipun kita sama-sama di Golkar ya, sekalipun sama-sama di Golkar. Data ini betul, bahwa realisasi investasi itu selalu di atas dari target RKP maupun target Bapak Presiden, merujuk pada *base line* tiga tahun terakhir, tiga atau empat tahun terakhir. Pertanyaan berikut adalah, apakah bisa di tahun 2024 untuk di atas 1.650 triliun? Memang ini butuh perenungan yang paling mendalam, *kenapa* saya belum berani membuat satu formulasi untuk menyatakan bahwa bisa dilakukan, *kenapa*? Karena 2024 itu adalah tahun dari Februari, dari Januari sampai dengan November, ini politik semua. Kita Januari *udah* kampanye, Februari pemilu, belum lagi putaran kedua, habis itu Oktober atau November pilkada, belum lagi putaran kedua. Jadi ini sepanjang tahun, tahun pilkada semua, terkecuali ada industri pilkada, itu baru target bisa melebihi target, tapi ini *enggak* ada industri di bidang pemilu dan pilkada, jadi ini membutuhkan apa ya, strategi yang jitu.

Namun, saya berpikir bahwa sekalipun dalam persoalan-persoalan politik, kata Pak Presiden Jokowi itu jangan panas-panas *banget*, kalau hangat-hangat itu *InsyaAllah*, karena sampai hari ini Pak Sarmuji, saya jujur mengatakan bahwa animo teman-teman investor baik dari dalam maupun luar negeri itu tidak terpengaruh jauh terhadap kondisi yang kita sedang menghadapi persoalan pemilu, saya juga heran *kenapa*. Biasanya itu saya tanya teman-teman, begitu kita sudah masuk pemilu *kayak* begini, *wait and see*, habis. Tapi ini kepercayaan itu tinggi sekali, gas terus, ini mau suka atau tidak suka, harus kita berterima kasih dan mengapresiasi kepemimpinan Pak Jokowi, baik dari dalam maupun luar negeri terhadap prospek, *trust global* kepada Pemerintah Indonesia, supaya KPI kita naik sedikit *gitu*.

Jadi itu Pak Sarmuji, Pimpinan, ini tapi nanti mungkin di bulan November kita sudah bisa memutuskan sampai atau tidak, karena kita masih mempunyai data-data. Biasanya kami itu satu tahun ke depan, kami sudah mempunyai data yang *fix* di bulan November-Desember. Karena kalau tidak, itu kami belum bisa melakukan rancangan. Kemudian kalau itu pun tercapai, terobosan apa yang dipakai? Nanti saya kasih tahu bulan November. Terobosannya ini sama dengan terobosan yang lainnya juga kira-kira, kemarin hampir jadi *tuh*, kira-kira.

Pak Martin, menyangkut dengan *global minimum tax*, ini begini sebenarnya. Benar yang tadi Pak Martin sampaikan, bahwa ini seolah-olah ada sebuah desain besar untuk tidak boleh negara-negara yang menjadikan pajak surga ini berdampak pada negara lain melakukan investasi, kan kira-kira begitu. Tapi menurut saya, itu hanya dikulitnya. Kalau ditanya, apa pandangan Kemenkeu dengan saya, dengan Kementerian Investasi? Kami dua di dua wilayah yang berbeda. Kalau Kementerian Investasi tugasnya adalah bagaimana mendatangkan investasi, kemudian menghasilkan empat atau lima *item* pajak, PPH badan, kemudian PPN, PPH Pasal 21, kemudian adalah PNPB, kemudian PPH Badan Kontraktor. *Nah*, kalau Kemenkeu menganggap bahwa semuanya, kalau kita dikasih *tax holiday*, maka itu rugi. Kalau saya berpendapat, bahwa sesuatu dinyatakan rugi kalau barang sudah ada, kalau barang belum ada, apa yang merugi? Sementara untuk orang, untuk datang investor, itu harus ada *sweetener*. *Nah*, menurut saya, ini butuh kajian. Kemarin saya pimpin rapat dengan seluruh Menteri-Menteri Investasi ASEAN. Saya katakan untuk mereka, bahwa jangan sampai kita menari digendang negara-negara maju, karena apa? *Base line*-nya beda. Mereka infrastrukturnya *udah* bagus,

mereka pinjamannya bunganya kecil, industrinya *udah* sekian puluh tahun, empat ratusan tahun mereka sudah ada. Negara-negara berkembang yang punya sumber daya alam yang besar, pasti *base line*-nya berbeda. Ketika *base line* berbeda, mereka lebih untung, pertanyaan berikut, instrumen apa yang harus membuat kita sama? *Nah*, di Indonesia selama ini adalah *sweetener*, pajak itu, *tax holiday* itu. Kalau *tax holiday* disamakan, *tax global* 15%, berarti kan kita tidak *enggak apple to apple*. Ini sama dengan strategi untuk investor-investor ini membangun industri negaranya dan memaksakan kita untuk mengirim bahan baku. Dan kemudian menurut saya, saya tidak tahu menteri yang lain, tapi pandangan saya, ini butuh kajian mendalam. Dan saya pernah ditanya, kalau kita memberlakukan seperti itu *gimana*? Saya yakinkan bahwa kalau tidak ada *sweetener* lain, pasti investasi kita di sektor industri hilirisasi akan berdampak, tidak berdampak positif, tapi berdampak negatif.

Dan ada hal lain yang mungkin saya tidak bahas di dalam sini, tidak menjelaskan, tentang bagaimana kontra strategi. Karena contoh katakanlah di Amerika, di Amerika sekarang memberikan subsidi 7.500 dolar kepada perusahaan yang membangun baterai mobilnya di Amerika. Eropa iya, Eropa membuat undang-undang agar baterai selnya harus dibangun di dekat pabrik mobil, ini *kan* semua mainan, ini. Tujuannya apa? Agar industri itu semua tertarik di sana. *Nah*, mereka melihat keunggulan komparatif kita, keunggulan komparatif kita di mana punya bahan baku, kemudian kita memberikan *tax holiday*, insentif fiskal. Kalau semuanya itu ditarik, berarti *kan* memaksakan kita juga untuk mengirim bahan baku. Dan saya pikir ilmu ini tidak di kampus, ilmu ini cuma di ilmu main *aja* dan Pak Sarmuji punya kemampuan untuk membaca ini, cuma Pak Sarmuji pura-pura *aja enggak* kasih tahu itu barang sebenarnya. Dan mudah-mudahan Pak Menko Perekonomian paham ini juga, Pak Sarmuji, *gitu kan*? Supaya kita *gitu loh*, ini politik dagang internasional *nih kan*. Jadi kalau boleh itu perlu *disampein* juga bila perlu ini menjadi satu diskusi, diskusi khusus di Golkar, supaya betul-betul juga punya, punya apa ya, punya bagian yang harus diperjuangkan dalam rangka bagaimana hilirisasi ini tetap eksis di negara kita. Ya sebagai kader *kan* mengingatkan, karena kita belum jadi pengurus *kan begitu*.

Saya pikir hanya itu, Pak Sarmuji, yang perlu saya sampaikan, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf.

*Wabillahi taufik wal hidayah,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

KETUA RAPAT (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Oke baik, *makasih*.

Enggak kerasa udah setengah enam, sekarang kita masuk ke dalam kesimpulan. Oke baik, draf kesimpulan Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia dan Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia, itu kepala kali ya, pakai kepala, dalam rangka pembahasan pelaksanaan anggaran sampai triwulan II 2023, pembahasan RKA K/L tahun anggaran 2024, satu, *enggak*, menteri *kan* depannya, Menteri Investasi/Kepala BKPM:

1. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dari Menteri Koperasi dan UKM RI mengenai realisasi tahun anggaran 2023 dan pagu anggaran tahun 2024 Kementerian Koperasi dan UKM RI.

Oke, kan sama itu sama nomor tiga ya? *Gabungin* saja lah, *udah pindahin aja* nanti biar *enggak* usah diketok lagi, yang nomor tiga itu dihapus. Iya itu kamu *copy*, dan, baik, ini *udah*? Oh menyetujuinya di bawah ya, *udah* iya.

Oke setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

2. Komisi VI DPR RI menerima dan menyetujui penjelasan dari Menteri Koperasi dan UKM RI berdasarkan surat bersama Menteri Keuangan Nomor 626/MK.02/2023 dan Menteri PPN/Bappenas Nomor B.644/M.PPN/D.8/PP.04/02/07/ 2023 tanggal 31 Juli 2023 perihal Pagu Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga tahun 2024 adalah sebesar Rp1.497.938.999.000,00 yang terdiri dari:
 - A. Program dukungan manajemen sebesar Rp411.038.534.000,00,
 - B. Program kewirausahaan UMKM dan koperasi sebesar Rp1.086.900.465.000,00,Untuk selanjutnya dibawa ke dalam rapat Badan Anggaran DPR RI.

Udah betul angkanya ya? Pak, udah betul semua ya? Baik kita ketok ya.

(RAPAT: SETUJU)

Langsung yang nomor 4, nomor 3 *udah* dihapus ya? *oke*.

3. Komisi VI DPR RI menerima dan menyetujui penjelasan dari Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia berdasarkan surat Menteri Keuangan RI dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas Nomor S626/MK.02/2023 dan Nomor B.644/M.PPN/D.8/PP.04/02/07/ 2023 tanggal 31 Juli 2023 perihal Pagu Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga tahun 2024 adalah sebesar Rp1.226.376.670.000,00 yang terdiri dari:
 - A. Program dukungan manajemen sebesar Rp416.144.568.000,00,
 - B. Program penanaman modal sebesar Rp810.232.102.000,00.Untuk selanjutnya akan dibawa ke dalam rapat Badan Anggaran DPR RI,

Benar Pak Sesmen, ya?

(RAPAT: SETUJU)

4. Kementerian, eh Komisi VI DPR RI meminta, Komisi VI DPR RI meminta Kementerian Koperasi dan UKM RI serta Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal RI untuk terus berupaya meningkatkan kinerja kementerian agar percepatan realisasi anggaran tahun 2023 dapat terwujud sesuai dengan target yang telah direncanakan.

(RAPAT: SETUJU)

5. Komisi VI DPR RI bersama dengan Kementerian Koperasi serta UKM RI, mana ini, dan, dan UKM RI serta Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal RI akan melakukan pembahasan RKA K/L tahun 2024 kembali sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI dalam waktu yang akan ditentukan kemudian.

Ini sesuai siklus anggaran *aja*, Pak, sebenarnya *sih* bisa kita setuju sekarang *aja*.

(RAPAT: SETUJU)

Iya, harusnya. Bisa di dapil harusnya ini.

6. Komisi VI DPR RI memberikan waktu kepada Kementerian Koperasi dan UKM RI serta Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal RI untuk memberikan jawaban tertulis dalam waktu paling lama lima hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.

Setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Menteri Investasi/Kepala BKPM dan Menteri Koperasi dan UKM beserta jajarannya.

Tidak ada lagi yang perlu kita diskusikan, apakah ada *closing statement*, Pak? Cukup? Baik, dengan demikian maka izinkan saya menutup rapat pada hari ini.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

(RAPAT DITUTUP PUKUL 17.39 WIB)

a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

TTD.

DEWI RESMINI, S.E., M.Si.
NIP. 197104071992032001